



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan tambang mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, surat izin penambangan batuan dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Cetak Biru Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terprogram, terarah dan terpadu;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati adalah Bupati di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

7. Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Cetak Biru PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
11. Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
13. Pemegang Izin Usaha Pertambangan adalah pemegang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau pemegang SIPB.

14. Masyarakat Sekitar Tambang adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Cetak Biru PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Penyusunan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana tata ruang wilayah nasional; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan Cetak Biru PPM harus melibatkan Bupati yang wilayahnya terdapat kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

- (1) Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat paling sedikit:
 - a. peningkatan indeks pembangunan manusia di Daerah;
 - b. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang;
 - c. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
 - d. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
 - e. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- (2) Peningkatan indeks pembangunan manusia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya Usaha Pertambangan.
- (4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal paling sedikit terdiri atas:
 - a. adat istiadat;
 - b. keagamaan;
 - c. olahraga dan seni; dan
 - d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.
- (5) Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada potensi dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola program secara mandiri.

- (6) Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada kebutuhan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Pasal 4

Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III EVALUASI

Pasal 5

- (1) Cetak Biru PPM dapat dievaluasi dan diubah 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan dan materi muatan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan Cetak Biru PPM.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan penyusunan Cetak Biru PPM bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi atau SIPB yang telah memiliki Rencana Program PPM, harus menyesuaikan Rencana Program PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

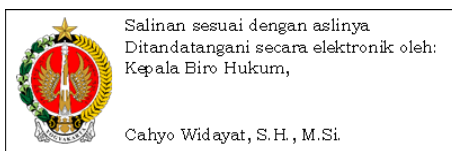
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 47



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
CETAK BIRU PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERNTENTU DAN BATUAN

CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

CETAK BIRU

*“Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
pada Kegiatan Usaha
Pertambangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta”*



*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan “Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari proses kajian dan penyusunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengevaluasi dan menyempurnakan arah kebijakan serta pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sektor pertambangan. Laporan ini mencakup berbagai aspek penting mulai dari latar belakang, metodologi penyusunan cetak biru, kondisi eksisting pertambangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang, hingga rencana strategis pengembangan PPM yang selaras dengan rencana pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyusunan cetak biru ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, pelaku usaha pertambangan, akademisi, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini.

Kami berharap cetak biru ini dapat menjadi acuan dan pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program PPM yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang di DIY.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	10
I.1. LATAR BELAKANG	10
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
I.2.1 Maksud	11
I.2.2 Tujuan.....	11
I.3. DASAR HUKUM.....	12
I.4. GAMBARAN UMUM	14
I.4.1. Kondisi Geografis	14
I.4.2. Kondisi Demografi	14
I.4.3. Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara.....	17
BAB II CETAK BIRU PPM SEKITAR PERTAMBANGAN	19
II.1. VISI DAN MISI PPM PROVINSI.....	19
II.1.1 Visi PPM Provinsi	19
II.1.2 Misi PPM Provinsi	19
II.2. KONDISI SAAT INI.....	19
II.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
II.2.2 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang.....	29
II.2.3 Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang	40
II.2.4 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Sekitar Tambang.....	45
II.2.5 Infrastruktur Sekitar Tambang	52
II.3. CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM	64
II.3.1 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68
II.3.2 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang	69
II.3.3 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang.....	73
II.3.4 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat	75
II.3.5 Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Kemandirian PPM.....	76
II.4. PENGAWASAN PPM.....	78
BAB III KESIMPULAN	81

III.1. KESIMPULAN.....	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Administrasi DIY.....	14
Gambar 1. 2	Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kapanewon Tahun 2023.....	16
Gambar 1. 3	Piramida Penduduk DIY Tahun 2023 (Sumber: Provinsi DIY dalam Angka Tahun 2024).....	17
Gambar 2. 1	Indeks Pembangunan Manusia Prov. DIY dibandingkan dengan IPM Indonesia tahun 2019 – 2023. IPM Indonesia tahun 2019 tidak dapat ditemukan dikarenakan adanya penghitungan IPM metode baru. (Sumber: BPS).....	24
Gambar 2. 2	Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2023 di DIY (Sumber: BRS Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2023).....	25
Gambar 2. 3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)	26
Gambar 2. 4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS).....	27
Gambar 2.5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)	28
Gambar 2. 6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS).....	29
Gambar 2. 7	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Sumber: RPJPD Kabupa ten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Badan Pusat Statistik DIY, Tahun 2024)	30
Gambar 2. 8	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik DIY, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025)	31
Gambar 2. 9	PDRB PerKapita ADHB di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah)	33
Gambar 2. 10	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2014-2024 (%) (Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, beberapa tahun diolah).....	38
Gambar 2. 11	PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2014 – 2023 (Sumber: BPS tahun 2014-2023).....	39
Gambar 2.12	Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Gunung Kidul.....	53

Gambar 2. 13 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024	56
Gambar 2. 14 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2024	59
Gambar 2. 15 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepadatan Penduduk DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 (Jiwa/km ²).....	15
Tabel 1.2	Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	17
Tabel 1.3	Rekapitulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	18
Tabel 1.4	Rekapitulasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	18
Tabel 2.1	Peningkatan IPM Prov. DIY dan Indeks Penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)	24
Tabel 2.2	Peningkatan IPM Kabupaten Gunungkidul dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber : BPS)	26
Tabel 2.3	Peningkatan IPM Kabupaten Sleman dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)	27
Tabel 2.4	Peningkatan IPM Kabupaten Kulon Progol dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)	28
Tabel 2.5	Peningkatan IPM Kabupaten Bantul dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)	29
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (persen), 2021-2024. (Sumber: BPS Kulon Progo, 2025).....	33
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.8	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025).....	36
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Kidul (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Gunung Kidul, 2024)	39
Tabel 2.10	Daya Dukung Sosial-Ekonomi Gunungkidul (Sumber, BPS Kab Gunungkidul)	39
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Kulon Progo, 2024).....	40
Tabel 2.12	Daya Dukung Sosial-Ekonomi Kulon Progo (Sumber, BPS Kab Kulon Progo)	41
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status	

Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Bantul, 2024).....	42
Tabel 2.14 Daya Dukung Sosial-Ekonomi Bantul (Sumber, BPS Kab Bantul)	43
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Sleman, 2024)	44
Tabel 2.16 Daya Dukung Sosial-Ekonomi Sleman (Sumber, BPS Kab Sleman).....	45
Tabel 2.17 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul, DIY. (Sumber :SID Kemendesa 2024).....	46
Tabel 2.18 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024)	48
Tabel 2.19 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024).....	49
Tabel 2.20 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2020-2024. (Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025) 50	
Tabel 2.21 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024).....	51
Tabel 2.22 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024.....	53
Tabel 2.23 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024	54
Tabel 2.24 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	56
Tabel 2.25 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	57
Tabel 2.26 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024	59
Tabel 2.27 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	60
Tabel 2.28 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2024	62
Tabel 2.29 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2024	62
Tabel 2.30 Program Pembangunan Daerah dan Keterkaitan Tujuan, Sasaran, serta Program Pemda.....	66
Tabel 2.31 Blue Print program pengembangan masyarakat dengan penerapan aspek SDGs dan keberlanjutan untuk sektor tambang di DIY	79
Tabel 3.1 Matrikulasi Fokus PPM yang Disesuaikan dengan Kondisi Per-Kabupaten	84

Tabel 3.2	Matriks PPM hasil tinjauan lapangan terhadap pelaku usaha tambang di Provinsi DIY	85
Tabel 3.3	Matriks PPM hasil tinjauan lapangan terhadap pemerintah desa sekitar tambang di Provinsi DIY	86
Tabel 3.4	Wawancara dengan Pelaku Usaha CV Handika Karya	88
Tabel 3.5	Wawancara dengan Pelaku Usaha PT Barokah Sumber Rezeqi.....	91
Tabel 3.6	Wawancara dengan Pelaku Usaha PT Sugih Alamnugroho	94
Tabel 3.7	Wawancara dengan Perwakilan Penambang	97
Tabel 3.8	Hasil Wawancara dengan Perangkat Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul	100
Tabel 3.9	Hasil Wawancara dengan Perangkat Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.....	103
Tabel 3.10	Hasil Wawancara dengan Ibu Penjaga Angkringan Pak Saman & Ibu Penjaga Toko Surodadi di Pasar Bedoyo	105
Tabel 3.11	Hasil Wawancara dengan Mas Iwan, Tokoh Masyarakat Kapanewon Cangkringan	106

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Sumber daya alam tersebut terdiri dari golongan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan dapat dimanfaatkan melalui kegiatan pertambangan. Selain memanfaatkan sumber daya alam, kegiatan pertambangan perlu diimbangi dengan memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kegiatan pertambangan dapat memberikan kontribusinya dengan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang, baik selama operasi tambang berlangsung maupun pasca tambang. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. PPM merupakan upaya mengembangkan masyarakat yang diarahkan guna mencapai kondisi dan kualitas kehidupan social ekonomi yang lebih baik, meliputi community relation (hubungan masyarakat), community services (pelayanan kepada masyarakat), dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat).

Sesuai dengan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program PPM tersebut didahului dengan penyusunan Rencana Induk PPM yang berpedoman pada Cetak Biru PPM yang ditetapkan oleh Gubernur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, disebutkan bahwa

Gubernur menyusun Cetak Biru PPM dengan ketentuan :

1. Melibatkan pemerintah kabupaten, pemegang IUP, akademisi, dan masyarakat; dan
2. Mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah.

Cetak Biru PPM DIY disusun sejalan dengan Visi Gubernur yaitu Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Misi yang dijabarkan untuk mencapai visi tersebut adalah: meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat, memberdayakan kawasan selatan, meningkatkan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, serta melestarikan lingkungan dan warisan budaya. PANCAMULIA juga sebagai Visi RPJMD DIY karena memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Cetak Biru PPM ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dapat dievaluasi dan diubah 5 (lima) tahun sekali. Dengan penyusunan Cetak Biru PPM, diharapkan program PPM dapat lebih terarah dan terukur dan menunjang Visi dan Misi Gubernur dan RPJMD.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

I.2.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY adalah menyusun dokumen perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di wilayah DIY.

I.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY adalah :

1. Memberikan pedoman bagi perusahaan tambang dalam menyusun rencana induk PPM dan program tahunan PPM untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
2. Mensinkronkan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan PPM dengan tujuan dari penutupan tambang agar antara lingkungan dan pemberdayaan manusianya bisa sejalan.

3. Memberikan panduan bagi perusahaan tambang dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
4. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah lokasi tambang.

I.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY, yaitu:

- a. **Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1955;
- b. **Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004** tentang Sumber Daya Air.
- d. **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah;
- e. **Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007** tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- f. **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas;
- g. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023** tentang Wilayah Pertambangan;
- j. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- k. **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018** tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l. **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
- m. **Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018** tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- n. **Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- o. **Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- p. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- q. **Undang-Undang No. 2 Tahun 2025** tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memperkuat prinsip keberpihakan terhadap koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), serta menekankan pentingnya peningkatan perekonomian daerah melalui kegiatan pertambangan
- r. **Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024** tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk penyesuaian jangka waktu perpanjangan izin dan prioritas pemberian WIUPK kepada badan usaha milik daerah dan perguruan tinggi untuk mendukung hilirisasi dan kepastian investasi
- s. **Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024** tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk penyesuaian jangka waktu perpanjangan izin dan prioritas pemberian WIUPK kepada badan usaha milik daerah dan perguruan tinggi untuk mendukung hilirisasi dan kepastian investasi
- t. **Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2023** Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027*. Perda ini menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan DIY selama lima tahun, termasuk penguatan sektor unggulan, pengurangan ketimpangan wilayah, dan pencapaian TPB/SDGs.

I.4. GAMBARAN UMUM

I.4.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7 .33' - 8 .12' Lintang Selatan dan 110 .00' -110 .50' Bujur Timur. DIY terletak di sisi selatan Pulau Jawa dengan luas 3.133,15 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia. Secara administrasi, DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat (Kabupaten Purworejo), sebelah utara (Kabupaten Magelang dan Boyolali), sebelah timur (Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri), serta di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi DIY

I.4.2. Kondisi Demografi

Perkembangan penduduk selama periode tahun 2010 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 3.457.491 orang yang terus meningkat menjadi 3.736.490 orang di tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dengan dinamika pertumbuhannya mengalami yaitu rata-rata 1,18% selama periode 2010 sampai 2019 dan 0,67% pada periode 2020 sampai 2023. Penurunan laju pertumbuhan penduduk bukan hanya disebabkan oleh faktor fertilitas dan mortalitas yang semakin kecil, yang menggambarkan keberhasilan program Keluarga Berencana dan semakin baiknya pelayanan kesehatan masyarakat. Faktor penurunan laju pertumbuhan penduduk yang

juga berpengaruh adalah faktor migrasi, yaitu migrasi keluar yang lebih besar dibandingkan migrasi masuk ke DIY.

Menurut distribusinya, daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara absolut dan secara persentase adalah Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sebanyak 1.093.110 orang atau 31,62% dari total penduduk DIY di tahun 2010 yang meningkat menjadi 1.157.290 orang atau 30,97% di tahun 2023. Jumlah penduduk dan persentase penduduk terkecil terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 374.900 orang atau 10,24% di tahun 2010 dan 375.700 orang atau 10,05% di tahun 2023. Sementara itu kenaikan pangsa penduduk terbesar selama tahun 2010 sampai 2023 adalah Kabupaten Bantul yang meningkat dari 21,25% (2010) menjadi 26,12% (2023).

Jumlah penduduk perempuan di DIY mendominasi pangsa penduduk total. Namun demikian pangsa penduduk perempuan mengalami penurunan dari 50,60% (2010) menjadi 50,48% (2022) dan 50,50% (2023). Hal tersebut menyebabkan angka sex ratio meningkat. Sex ratio pada tahun 2010 adalah 97,62, tahun 2022 adalah 98,09 dan 2023 adalah 98,02.

Kepadatan penduduk antar wilayah di DIY menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dinamika kepadatan penduduk DIY dalam rentang 5 tahunan sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

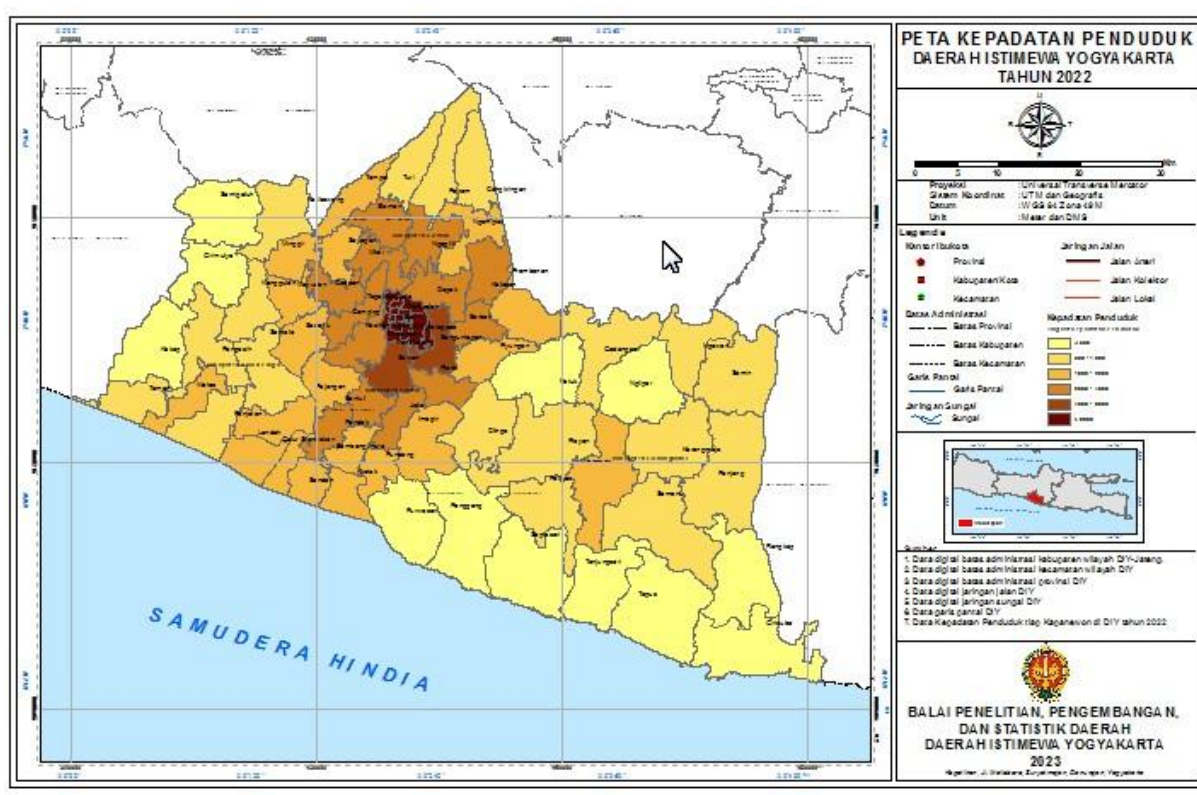
Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 (Jiwa/km²)

Wilayah	2010	2015	2020	2023
DIY	1.103	1.155	1.152	1.173
Kulon Progo	670	703	744	756
Bantul	1.831	1.917	1.940	1.992
Gunungkidul	441	470	522	506
Sleman	1.939	2.025	1.959	2.013
Kota Yogyakarta	12.123	12.699	11.495	11.560

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Kepadatan penduduk DIY selama tahun 2010 sampai 2023 menunjukan tren meningkat dari 1.103 jiwa/km² di awal periode menjadi 1.173 di akhir periode. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Yogyakarta. Di tahun 2023, kepadatan penduduknya adalah 11.560 jiwa/km². Sementara itu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah terbesar di DIY dengan luas 1.485 km². Meskipun demikian

kepadatannya meningkat dari 441 jiwa/km² (2010) menjadi 506 jiwa/km² (2023). Kepadatan penduduk terendah kedua terdapat pada Kabupaten Kulon Progo dengan kepadatan sebesar 670 jiwa/km² (2010) dan meningkat menjadi 756 jiwa/km² (2023).

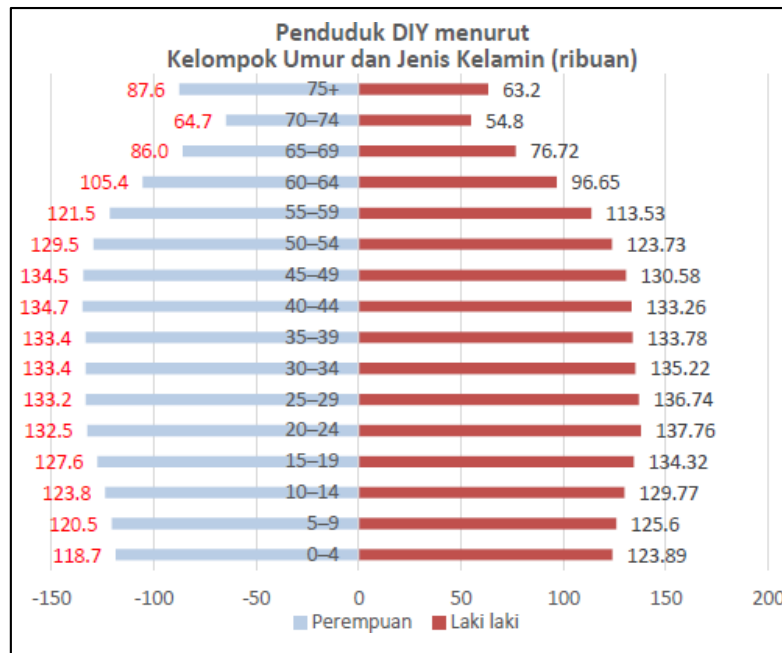


Gambar 1. 2 Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kapanewon Tahun 2023

Dari visualisasi kepadatan penduduk dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk DIY terkonsentrasi pada klaster wilayah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul disinyalir mengalami migrasi keluar daerah yang disebabkan oleh daya tarik ekonomi pada kawasan Kartamantul tersebut. Perlu dikembangkan simpul simpul ekonomi baru yang bekerja efektif pada wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengendalikan fenomena pemusatan demografi tersebut.

Pada tahun 2023, DIY memiliki piramida penduduk dengan tipe ekspansif yang menunjukkan pola piramida yang lebar dibagian bawah dan tengah karena didominasi penduduk usia muda ataupun penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 2.562.310 jiwa atau 68,54% dari populasi penduduk di DIY. Hal ini menunjukkan penurunan dari angka usia produktif di tahun 2022 yaitu 2.582.007 jiwa atau 69% dari jumlah populasi DIY. Sementara itu, penduduk usia tidak produktif yang berada pada kelompok usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 64 tahun, berturut-turut sebesar 742.210 (19,86%) turun dari tahun 2022 sebesar 753.513 jiwa (20%) dan 432.990 (11,59%) naik dari tahun 2022 sebesar 432.990 (11,59%)

426.350 jiwa (11,00%). Penurunan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk usia tidak produktif kelompok muda dan penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif kelompok lansia menunjukkan mulai berakhirnya era bonus demografi pada suatu wilayah. Manfaat dari peningkatan kualitas layanan kesehatan menyebabkan harapan hidup lebih lama, dan penduduk kelompok usia lansia semakin besar. Menghadapi fenomena tersebut perlu dipikirkan program program yang mendorong peningkatan kemandirian para lanjut usia (lansia).



Gambar 1. 3 Piramida Penduduk DIY Tahun 2023 (Sumber: Provinsi DIY dalam Angka Tahun 2024)

I.4.3. Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat empat jenis izin yang ada, yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Berikut ini adalah data jenis izin yang dimiliki di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku hingga April 2025.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

No	Kabupaten	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Tanah Urug	Batu Gamping	Andesit	Jumlah
1	Bantul	1	0	0	0	1
2	Gunungkidul	0	0	6	0	6
3	Kulon Progo	5	6	0	11	22
4	Sleman	5	0	0	0	5

5	Bantul dan Kulon Progo	1	0	0	0	1
6	Kulon Progo dan Sleman	1	0	0	1	1
JUMLAH		13	6	6	12	36

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

No	Kabupaten	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Feldspar	Kaolin	Batu gamping	Breksi Batuapung	Breksi Batu Pasir Tufan	Zeolit	Emas	Jumlah
1	Bantul	13	0	0	0	0	0	0	0	13
2	Gunungkidul	0	2	0	1	0	0	0	0	3
3	Kulon Progo	3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Sleman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bantul dan Kulon Progo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kulon Progo dan Sleman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		16	2	0	1	0	0	0	0	19

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

No	Kabupaten/Kota	Tanah Urug
1	Yogyakarta	0
2	Bantul	0
3	Kulon Progo	0
4	Gunungkidul	1
5	Sleman	0
TOTAL		1

Dari tabel-tabel diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada Pertambangan pada Kota Yogyakarta, untuk Kabupaten Sleman terdapat IUP OP. Pada Kabupaten Bantul terdapat IUP OP dan IPR. Pada Kabupaten Gunungkidul terdapat IUP OP, IPR dan SIPB dan pada Kabupaten Kulon Progo terdapat IUP OP, dan IPR.

BAB II

CETAK BIRU PPM SEKITAR PERTAMBANGAN

II.1. VISI DAN MISI PPM PROVINSI

II.1.1 Visi PPM Provinsi

Terciptanya hubungan harmonis antara masyarakat sekitar tambang dengan pemilik kepentingan tambang melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan PANCAMULIA.

II.1.2 Misi PPM Provinsi

Adapun misi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah disebutkan adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup kehidupan-penghidupan masyarakat, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, kemandirian ekonomi, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni antar kehidupan bermasyarakat dan lingkungan.
- d. Terwujudnya peningkatan Pendidikan dan Kesehatan masyarakat sekitar tambang.
- e. Terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat dan infrastruktur penunjang masyarakat.

II.2. KONDISI SAAT INI

II.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

II.2.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran yang dapat diukur secara global. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990, sehingga menjadi acuan yang diakui secara global. IPM lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif daripada sekedar menggunakan acuan pendapatan per kapita suatu

daerah seperti sebelum-sebelumnya.

IPM sangat bermanfaat sebagai penentuan tingkat perkembangan manusia. IPM ini sendiri, erat kaitannya dengan implementasi ESG, Dimana penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang baik dapat meningkatkan nilai IPM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), manfaat dari IPM adalah sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sebagai indikator penting terhadap pembangunan kualitas hidup manusia, IPM mengukur setidaknya tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi memiliki pengertian sangat luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat maka digunakan indikator yang umum berupa umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan maka digunakan indikator berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Terakhir, untuk menghitung dimensi standar hidup layak maka digunakan lah indikator berupa kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup yang layak.

A. Indeks Kesehatan

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Untuk penghitungan umur harapan hidup maka dilakukan lah pendekatan tidak langsung (Indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung Angka Harapan Hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi negara Indonesia dan negara Asia Tenggara lain umumnya.

Angka Harapan Hidup dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Keterangan :

UHH : Angka Harapan Hidup
UHH_{min} : Angka Harapan Hidup Terendah
UHH_{maks} : Angka Harapan Hidup Tertinggi

B. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberikan bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai anak yang berusia 7 tahun.

Indeks Pendidikan dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

Keterangan :

HLS : harapan lama sekolah
HLS_{min} : harapan lama sekolah terendah
HLS_{maks} : harapan lama sekolah tertinggi

$$\text{Indeks Rata - Rata Lama Sekolah} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Keterangan :

RLS : rata-rata lama sekolah
 RLSmin : rata-rata lama sekolah terendah
 RLSmaks : rata-rata lama sekolah tertinggi

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Keterangan :

IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah
 IRLS : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

C. Indeks Pengeluaran

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing power parity) berbasis formula Rao.

Indeks Ekonomi dapat diukur dengan perhitungan pengeluaran sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

IPM dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran}} \times 100$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelompok sangat tinggi ($IPM \geq 80$)
- Kelompok tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Kelompok sedang ($60 \leq IPM < 70$)

- Kelompok rendah (IPM < 60)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan capaian pembangunan dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, IPM menjadi alat ukur strategis untuk memahami kondisi eksisting dan menentukan arah kebijakan intervensi program PPM ke depan.

Program PPM yang dirancang untuk masyarakat sekitar tambang harus mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang tergambar dari angka IPM. Oleh karena itu, pemetaan kondisi IPM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi dasar dalam menyusun Cetak Biru PPM, sekaligus memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut ini disajikan data IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten/kota di dalamnya, sebagai dasar analisis kondisi saat ini dan pijakan dalam menyusun arah kebijakan PPM yang tepat sasaran.

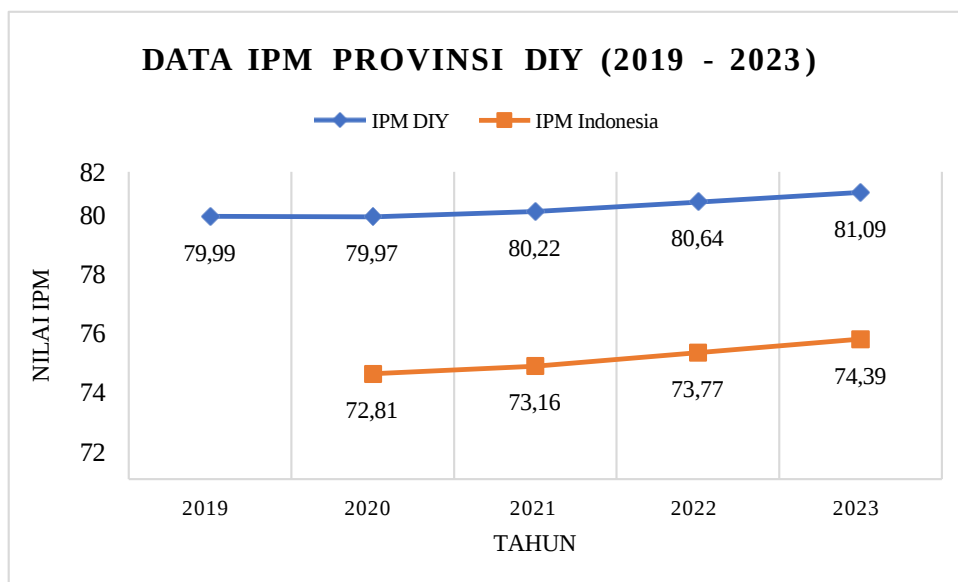
II.2.1.2 IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Data dari BPS Provinsi DIY menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh Provinsi DIY secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, terdapat satu tahun dimana IPM DIY sempat mengalami penurunan sebanyak 0,02% yaitu pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut yang menghambat perkembangan IPM. Namun, setelah Pandemi berakhir, nilai IPM mulai beranjak naik dengan nilai yang cukup signifikan. Secararata – rata, IPM DIY meningkat sebesar 0,22 poin setiap tahunnya.

Perhitungan IPM Prov. DIY dilakukan oleh BPS dengan metode yang telah dijelaskansebelumnya. Peningkatan IPM Prov. DIY tidak terlepas dari peningkatan tiga indeks dimensipenyusun IPM. Seiring dengan meningkatnya IPM, indeks dimensi penyusun IPM juga meningkat.

Dalam data indikator penyusun IPM provinsi DIY, terdapat trend kenaikan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID-19,

hampir semua indikator menunjukkan trend kenaikan yang sangat sedikit dibandingkan dengan tahun – tahun lainnya. IPM DIY tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data IPM rata – rata di Indonesia.



Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia Prov. DIY dibandingkan dengan IPM Indonesia tahun 2019 – 2023. IPM Indonesia tahun 2019 tidak dapat ditemukan dikarenakan adanya penghitungan IPM metode baru. (Sumber: BPS)

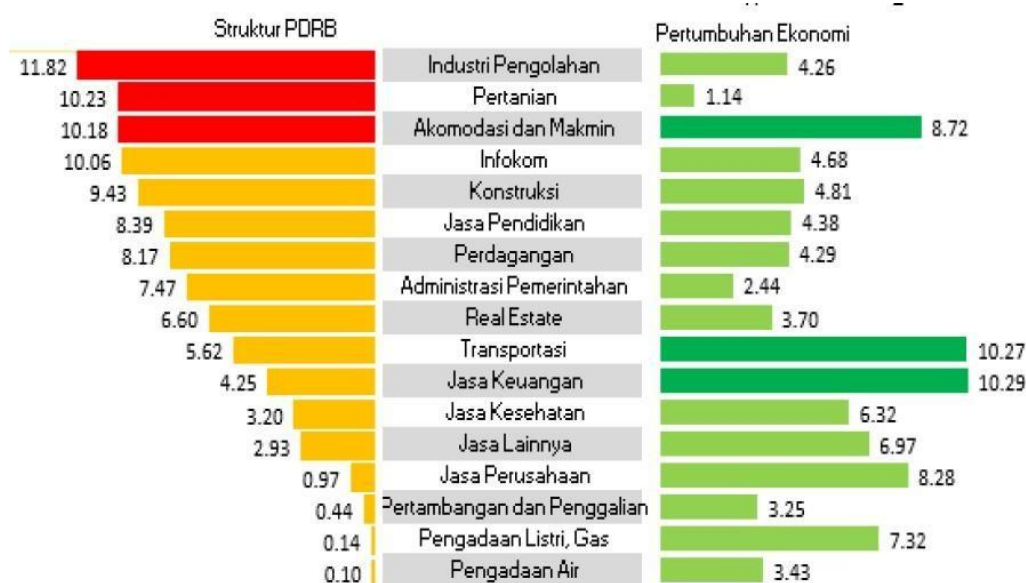
Tabel 2. 1 Peningkatan IPM Prov. DIY dan Indeks Penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,92	74,99	75,04	75,08	75,12
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,58	15,59	15,64	15,65	15,66
Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	9,38	9,55	9,64	9,75	9,83
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp/Orang/ Tahun	14.394	14.015	14.111	14.482	14.924
IPM		79,99	79,97	80,22	80,64	81,09

Pada dasarnya belum ada penelitian data yang mengukur kontribusi IPM per sektor Ekonomi. Maka dari itu, belum bisa diketahui kontribusi sektor tambang di DIY terhadap peningkatan IPM. Namun, hal ini dapat diketahui secara garis besar melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY (Gambar 2.1).

Pada tahun 2023 sendiri, sektor tambang hanya mencakup sebesar 0,44% terhadap PDRB. Nilai pertumbuhan sektor tambang juga tidak cukup besar dengan nilai hanya sebesar 3,25%. Namun, secara nilai, sektor tambang memiliki kontribusi 799 Miliar Rupiah. Nilai inimerupakan nilai yang cukup untuk sektor tambang agar

dapat berkontribusi terhadap perkembangan IPM, terutama pada masyarakat lingkartambang.



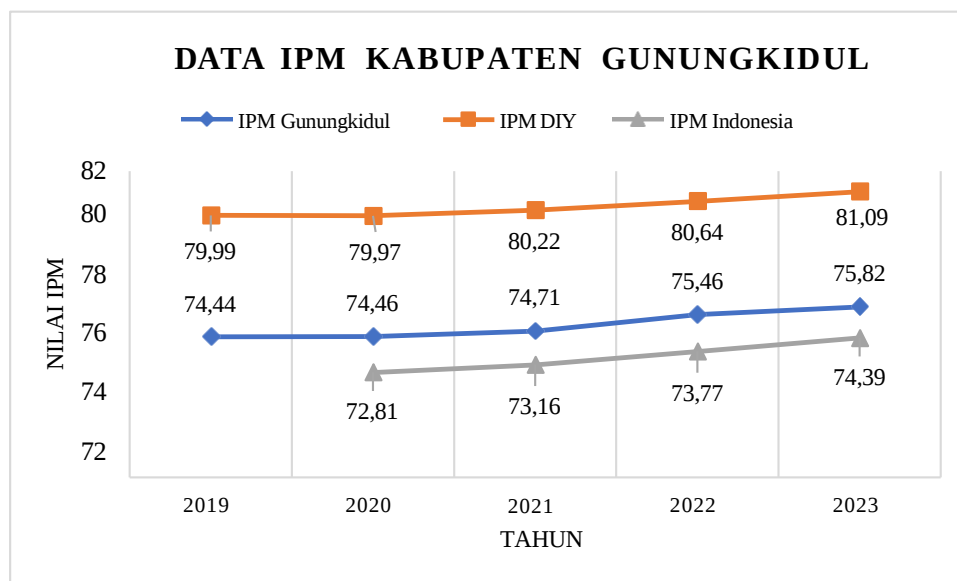
Gambar 2. 2 Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2023 di DIY (Sumber: BRS Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2023)

II.2.1.3 IPM Kabupaten Gunung Kidul

Data dari BPS Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sempat mengalami angka paling kecil pada tahun 2020.

Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut yang menghambat kenaikan nilai dari IPM. Namun, setelah Pandemi berakhir, nilai IPM mulai beranjak naik dengan nilai yang cukup signifikan. Secara rata – rata, IPM Kabupaten Gunung Kidul meningkat sebesar 0,27 poin setiap tahunnya.

Perhitungan IPM Kabupaten Gunung Kidul dilakukan oleh BPS dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan IPM Kabupaten Gunung Kidul tidak terlepas dari peningkatan tiga indeks dimensi penyusun IPM. Seiring dengan meningkatnya IPM, indeks dimensi penyusun IPM juga meningkat.



Gambar 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)

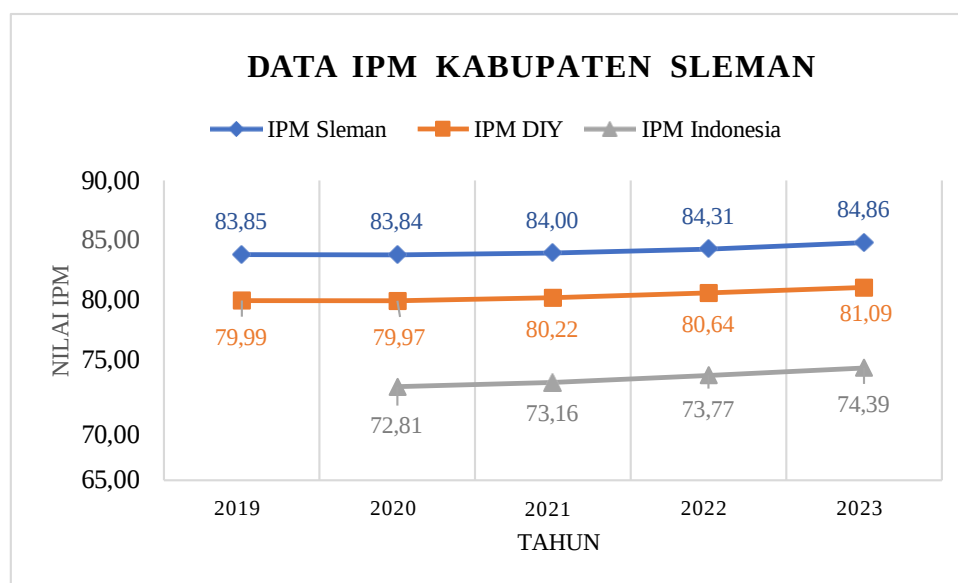
Tabel 2. 2 Peningkatan IPM Kabupaten Gunungkidul dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber : BPS)

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,2	75,24	75,27	75,28	75,29
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,38	14,48
Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	8,66	8,86	9,02	9,17	9,18
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp/Orang/Tahun	10,275	10,041	10,069	10,511	10,723
IPM Gunungkidul		74,44	74,46	74,71	75,46	75,82

II.2.1.4 IPM Kabupaten Sleman

Data dari BPS Kabupaten Sleman menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh wilayah Kabupaten Sleman cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Sleman sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut yang menghambat kenaikan nilai dari IPM. Namun, setelah Pandemi berakhir, nilai IPM mulai beranjak naik dengan nilai yang cukup signifikan. Secara rata – rata, IPM Kabupaten Sleman meningkat sebesar 0,2 poin setiap tahunnya.

Perhitungan IPM Kabupaten Sleman dilakukan oleh BPS dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan IPM Kabupaten Sleman tidak terlepas dari peningkatan tiga indeks dimensi penyusun IPM. Seiring dengan meningkatnya IPM, indeks dimensi penyusun IPM juga meningkat.



Gambar 2. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)

Tabel 2. 3 Peningkatan IPM Kabupaten Sleman dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)

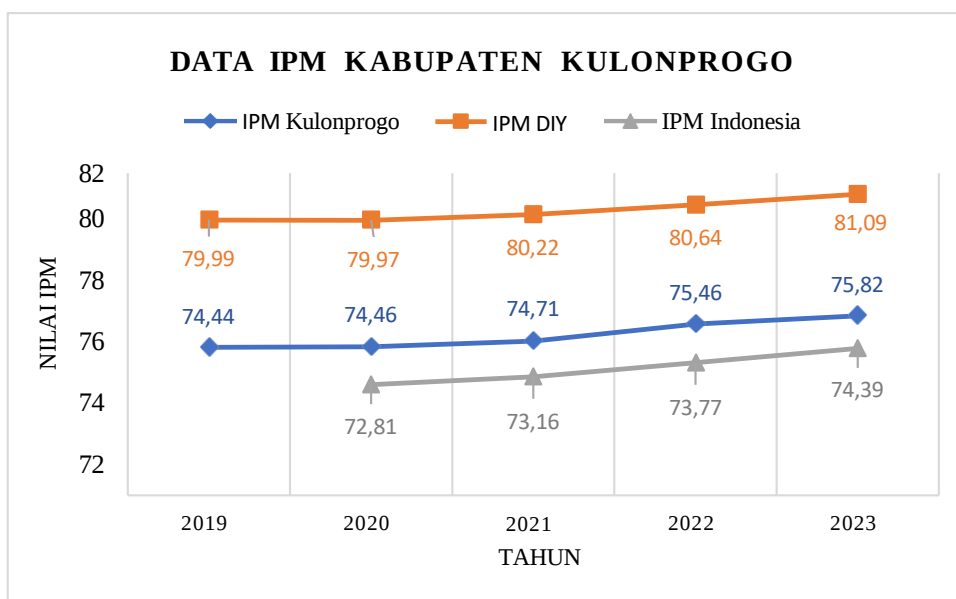
Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,77	74,81	74,92	75,00	75,08
Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,72	16,73	16,74	16,76	16,77
Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	10,67	10,91	10,92	10,94	11,01
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp/Orang/Tahun	16,434	15,926	16,060	16,438	16,976
IPM Kabupaten Sleman		83,85	83,84	84,00	84,31	84,86

II.2.1.5 IPM Kabupaten Kulon Progo

Data dari BPS Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Kulon Progo sempat mengalami angka terkecil pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut yang menghambat kenaikan nilai dari IPM. Namun, setelah Pandemi berakhir, nilai IPM mulai beranjak naik dengan nilai yang cukup signifikan. Secara rata – rata, IPM Kabupaten Kulon Progo meningkat sebesar 0,27 poin setiap tahunnya.

Perhitungan IPM Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh BPS dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan IPM Kabupaten Kulon Progo tidak

terlepas dari peningkatan tiga indeks dimensi penyusun IPM. Seiring dengan meningkatnya IPM, indeks dimensi penyusun IPM juga meningkat.



Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)

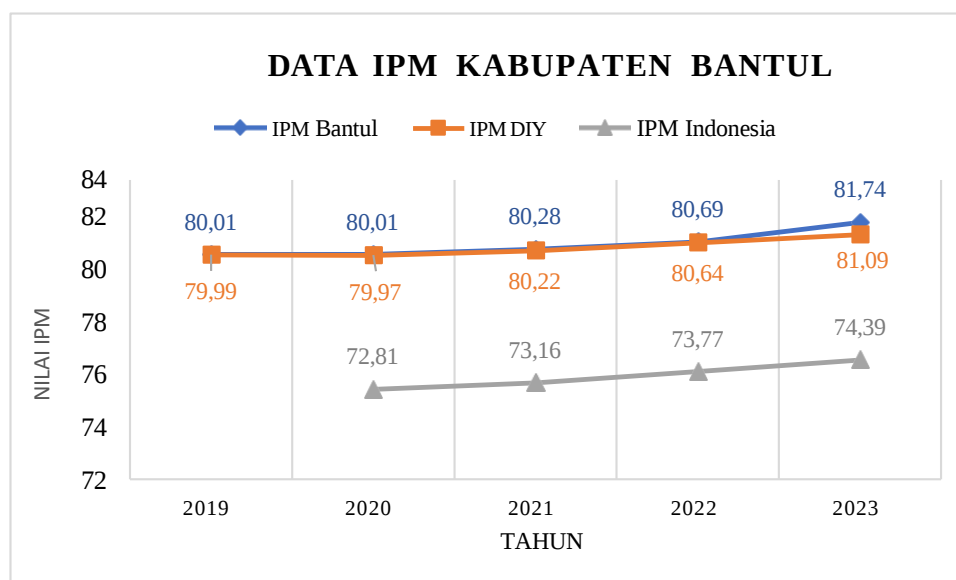
Tabel 2. 4 Peningkatan IPM Kabupaten Kulon Progol dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,20	75,24	75,27	75,28	75,29
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,38	14,48
Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	8,66	8,86	9,02	9,17	9,18
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp/Orang/Tahun	10,275	10,041	10,069	10,511	10,723
IPM Kulon Progo		74,44	74,46	74,71	75,46	75,82

II.2.1.6 IPM Kabupaten Bantul

Data dari BPS Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh wilayah Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Sleman sempat mengalami fase tidak mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut yang menghambat kenaikan nilai dari IPM. Namun, setelah Pandemi berakhir, nilai IPM mulai beranjak naik dengan nilai yang cukup signifikan. Secara rata – rata, IPM Kabupaten Bantul meningkat sebesar 0,34 poin setiap tahunnya.

Perhitungan IPM Kabupaten Bantul dilakukan oleh BPS dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan IPM Kabupaten Bantul tidak terlepas dari peningkatan tiga indeks dimensi penyusun IPM. Seiring dengan meningkatnya IPM, indeks dimensi penyusun IPM juga meningkat



Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dibandingkan dengan IPM Indonesia dan DIY tahun 2019 – 2023. IPM (Sumber: BPS)

Tabel 2. 5 Peningkatan IPM Kabupaten Bantul dan indeks penyusun IPM 2019 – 2023 (Sumber: BPS)

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,86	73,89	73,90	73,94
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,15	15,38	15,38	15,48	15,61
Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	9,54	9,57	9,57	9,59	9,79
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp/Orang/Tahun		1.366,0 0	1.418,0 0	1.456,0 0	1.769,0 0
IPM		80,01	80,01	80,28	80,69	81,74

II.2.2 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang

Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sekitar tambang di Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor-sektor non-pertambangan seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun demikian, potensi ekonomi yang berkaitan dengan sektor tambang masih terbuka, terutama melalui hilirisasi, pengolahan material tambang, dan dukungan infrastruktur lokal. Berikut ini uraian per kabupaten/kota:

II.2.3.1 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul memiliki kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

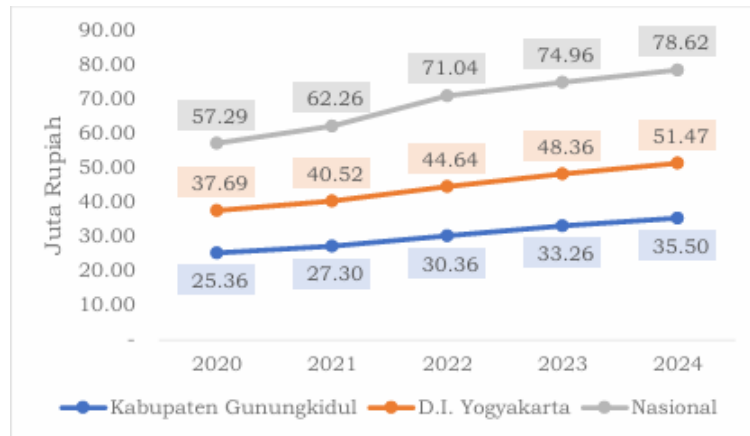
(PDRB) terbesar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh sektor perdagangan dan konstruksi. Namun demikian, struktur perekonomian Gunungkidul masih ditopang oleh sektor-sektor dengan produktivitas rendah, termasuk tambang yang belum berkontribusi signifikan terhadap total PDRB.

Pada periode 2020–2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sempat berkontraksi hingga -0,68 persen akibat pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dan mencapai titik tertinggi sebesar 5,37 persen pada 2022. Setelah itu, pertumbuhan melambat secara bertahap menjadi 5,04 persen pada 2023 dan diperkirakan turun kembali menjadi 4,81 persen pada 2024. Pola ini sejalan dengan dinamika ekonomi DIY dan nasional, meskipun DIY sempat mencatat kontraksi lebih tajam pada 2020. Secara keseluruhan, tren tersebut tetap mencerminkan arah pemulihan ekonomi pascapandemi.



Gambar 2. 7 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Badan Pusat Statistik DIY, Tahun 2024)

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan, yakni dari Rp25,36 juta pada 2020 menjadi Rp35,50 juta pada 2024. Meski demikian, laju pertumbuhan ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan DIY yang meningkat dari Rp37,69 juta menjadi Rp51,47 juta, serta nasional yang naik dari Rp56,86 juta pada 2020 menjadi Rp78,62 juta pada 2024. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan, yang menegaskan perlunya strategi percepatan pembangunan ekonomi di Gunungkidul agar mampu mendekati capaian rata-rata provinsi maupun nasional.



Gambar 2. 8 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik DIY, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025)

Struktur ekonomi masyarakat sekitar tambang di Gunungkidul masih bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, dengan kontribusi sektor tambang yang sangat terbatas (<2% PDRB). Kegiatan tambang belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi lokal, dan angka kemiskinan di beberapa wilayah lingkaran tambang masih relatif tinggi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan, sebanyak 461.326 penduduk usia kerja di Gunungkidul telah bekerja, dengan dominasi laki-laki (252.644 jiwa) dibanding perempuan (208.682 jiwa). Status pekerjaan utama didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai (135.532 jiwa), pelaku usaha dibantu buruh tidak tetap (88.042 jiwa), dan pekerja keluarga/tidak dibayar (108.385 jiwa). Perempuan secara signifikan mendominasi kategori pekerja keluarga, menunjukkan pola kerja berbasis rumah tangga yang kuat. Sementara itu, pekerja bebas dan pelaku usaha mandiri juga berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi lokal, mencerminkan ketergantungan pada sektor informal dan pertanian.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Kidul (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Gunung Kidul, 2024)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	49.353	45.044	94.397
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	64.686	23.356	88.042
Berusaha dibantu buruh tetap	5.783	3.820	9.603
Buruh/Karyawan/Pegawai	92.347	43.185	135.532
Pekerja bebas	21.919	3.448	25.367
Pekerja keluarga/tak dibayar	18.556	89.829	108.385
Jumlah	252.644	208.682	461.326

Tabel 2. 7 Daya Dukung Sosial-Ekonomi Gunungkidul (Sumber, BPS Kab Gunungkidul)

Indikator	Nilai (2024)
Angka Kemiskinan	15,18%
Kontribusi sektor pertanian	42,3% tenaga kerja
Kontribusi sektor tambang	<2% PDRB
Jumlah UMKM aktif	±1.800 unit
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,2 (kategori sedang)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul, angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 15,18%, lebih tinggi dari rata-rata DIY. Sektor pertanian masih menyerap ±42% tenaga kerja, sementara sektor tambang hanya menyumbang <2% PDRB

Sektor unggulan daerah meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM berbasis lokal, khususnya pariwisata alam (pantai, geosite, dan kawasan karst). Tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas pertanian lahan kering dan keterbatasan akses air bersih. Tingkat kemiskinan di Gunungkidul juga masih relatif tinggi dibanding kabupaten lain di DIY, dengan konsentrasi kemiskinan berada di wilayah-wilayah lingkaran tambang.

Dalam konteks ini, partisipasi warga dalam kegiatan PPM mulai menunjukkan dampak positif, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja di perusahaan tambang dan pemberian bantuan sosial. Oleh karena itu, Program PPM diarahkan untuk memperkuat ekonomi rumah tangga melalui pengembangan UMKM, pelatihan agribisnis, dan penguatan ekonomi produktif desa berbasis sektor unggulan lokal seperti pertanian dan peternakan. Diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata komunitas dan agrobisnis melalui kelembagaan desa juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas tambang serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II.2.3.2 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Kabupaten Kulon Progo

Struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo ditopang oleh sektor jasa, pertanian, dan industri pengolahan. Kegiatan pertambangan yang berkembang di Kulon Progo, seperti pasir besi, belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), perekonomian Kulon

Progo menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,37 persen, yang menjadi nilai terendah di antara kabupaten/kota di DIY dalam empat tahun terakhir. Namun, pada 2022 pertumbuhan melonjak signifikan hingga 6,58 persen dan menjadi yang tertinggi di DIY, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan stimulus lokal yang efektif pasca pandemi. Meski demikian, laju pertumbuhan kembali melambat menjadi 5,65 persen pada 2023 dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,77 persen pada 2024. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata provinsi pada masing-masing tahun, sehingga diperlukan strategi lanjutan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan.

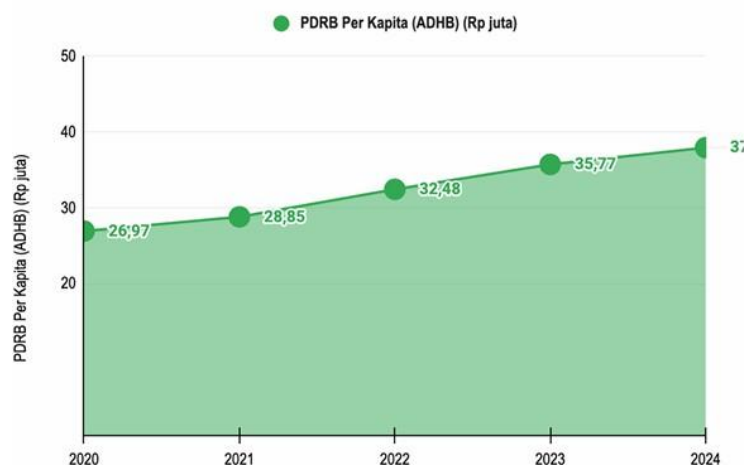
Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (persen), 2021-2024. (Sumber: BPS Kulon Progo, 2025)

KAB/KOTA	2021	2022	2023*	2024**
Sleman	5,61	5,15	5,09	5,19
Yogyakarta	5,16	5,12	5,08	5,05
Bantul	5	5,19	5,06	5,04
D.I. Yogyakarta	5,58	5,15	5,07	5,03
Gunungkidul	5,31	5,37	5,04	4,81
Kulon Progo	4,37	6,58	5,65	4,77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020 tercatat Rp26,97 juta, meningkat menjadi Rp28,85 juta pada 2021, Rp32,48 juta pada 2022, Rp35,77 juta pada 2023, dan mencapai Rp37,98 juta pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi secara nominal, baik dari sisi produksi maupun pendapatan masyarakat, meskipun secara relatif masih lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di DIY.



Gambar 2. 9 PDRB PerKapita ADHB di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: Bapperida 2025, diolah)

Ekonomi masyarakat lingkaran tambang mayoritas masih bertumpu pada pertanian, peternakan, dan jasa informal. Sektor tambang belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja mencapai 259.421 jiwa, dengan distribusi gender relatif seimbang. Status pekerjaan utama didominasi oleh buruh/karyawan (87.042 jiwa), pelaku usaha mandiri (41.429 jiwa), dan pekerja keluarga/tidak dibayar (42.681 jiwa). Perempuan secara dominan masuk dalam kategori pekerja keluarga, sedangkan laki-laki lebih banyak pada sektor usaha dan buruh tidak tetap. Struktur ini mencerminkan ketergantungan tinggi pada sektor informal dan usaha mikro, dengan peran signifikan perempuan dalam pekerjaan tidak bergaji.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Kulon Progo, 2024)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	21.795	19.634	41.429
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	31.930	21.740	53.670
Berusaha dibantu buruh tetap	4.305	1.316	5.621
Buruh/karyawan	49.255	37.787	87.042
Pekerja bebas di pertanian	7.697	4.982	12.679
Pekerja bebas non pertanian	14.130	2.169	16.299
Pekerja keluarga/tak dibayar	9.483	33.198	42.681
Jumlah	138.595	120.826	259.421

Daya dukung sosial-ekonomi juga menunjukkan tantangan tersendiri. Angka kemiskinan masih cukup tinggi sebesar 13,92 persen, dengan sekitar 39,1 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Kontribusi sektor tambang terhadap PDRB relatif kecil, hanya $\pm 1,5$ persen. Jumlah UMKM aktif sekitar 2.100 unit, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada angka 70,1 (kategori sedang), menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang moderat.

Tabel

Sektor unggulan Kulon Progo meliputi pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata berbasis keberadaan Bandara YIA. Namun, keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur strategis masih menjadi kendala dalam mendorong pemerataan ekonomi lokal. Dalam konteks kawasan tambang, isu penting adalah transformasi ekonomi lokal dari sektor primer ke sekunder dan tersier agar masyarakat dapat masuk dalam rantai nilai produksi, termasuk pengolahan hasil tambang dan jasa penunjangnya.

Kegiatan PPM telah berkontribusi positif, misalnya melalui pelatihan UKM, dukungan beasiswa, serta bantuan bibit dan kolam ikan. Ke depan, PPM diarahkan

untuk memperkuat sinergi tambang–pertanian–pariwisata, mengembangkan UMKM berbasis bahan galian, serta mendorong wirausaha bagi perempuan dan pemuda. Diversifikasi ekonomi pascatambang menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

II.2.3.3 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Kabupaten Bantul

Perekonomian Kabupaten Bantul sebagian besar bertumpu pada sektor industri pengolahan kecil, perdagangan, dan jasa pariwisata. Masyarakat di sekitar tambang di wilayah selatan Bantul sebagian besar bekerja di sektor informal dan pertanian, dengan akses terbatas pada pasar dan teknologi.

Jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup tajam dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,65 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak awal Maret 2020. Pemulihan mulai terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen, dan berlanjut membaik pada 2022. Pada 2023, perekonomian Bantul tumbuh sebesar 5,05 persen, sejalan dengan rata-rata DIY (5,04 persen) dan sedikit lebih rendah dibandingkan capaian nasional (5,03 persen). Namun demikian, pada 2023 dan 2024 tren pertumbuhan ekonomi Bantul, DIY, dan nasional kembali menunjukkan perlambatan, yang menandakan perlunya strategi penguatan ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.

Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kabupaten Bantul (%)	-1,65	5,00	5,19	5,06	5,04
LPE DIY (%)	-2,67	5,58	5,15	5,07	5,03
LPE Nasional (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar **-1,65 persen** akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, ekonomi kembali tumbuh sebesar **5,00 persen**, diikuti peningkatan stabil pada 2022 sebesar **5,19 persen**. Namun, pada 2023 pertumbuhan sedikit melambat menjadi **5,06 persen** dan kembali turun menjadi **5,04 persen** pada 2024. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun perekonomian Bantul berhasil pulih pasca pandemi, tren pertumbuhan belum

menunjukkan percepatan yang signifikan.

Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025)

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,80	1,59	1,54	0,92	0,84
2	Pertambangan dan Penggalian	-11,32	- 5,46	2,39	2,38	0,50
3	Industri Pengolahan	- 4,71	0,59	3,53	4,44	3,75
4	Pengadaan Listrik, Gas	- 1,77	2,14	6,72	7,13	10,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,16	6,28	4,06	3,40	1,37
6	Konstruksi	-13,78	11,27	5,72	5,13	8,42
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	- 4,20	1,07	5,37	4,38	4,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-12,58	3,69	14,69	7,73	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,55	6,72	12,70	8,53	8,21
10	Informasi dan Komunikasi	19,89	15,83	3,88	4,72	4,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 2,41	1,76	5,81	11,76	7,45
12	Real Estate	0,23	0,04	3,25	3,83	4,14
13	Jasa Perusahaan	-14,40	7,75	7,13	8,42	5,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- 1,96	- 0,72	3,32	2,46	6,59
15	Jasa Pendidikan	3,79	4,95	0,91	5,35	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,86	3,98	4,61	6,37	5,41
17	Jasa Lainnya	-11,21	15,14	12,32	10,05	3,79
PDRB		- 1,65	5,00	5,19	5,06	5,04

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja di Bantul pada 2024 tercatat 585.625 jiwa, dengan dominasi laki-laki (318.107 jiwa). Status pekerjaan utama didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai (282.769 jiwa), pelaku usaha mandiri (125.507 jiwa), dan pekerja keluarga/tidak dibayar (60.633 jiwa). Perempuan mendominasi kategori pekerja keluarga, sementara distribusi pelaku usaha mandiri relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan perpaduan ekonomi urban–rural, dengan sektor jasa dan UMKM sebagai penggerak utama.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Bantul, 2024)

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	62.457	63.050	125.507
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	42.301	24.388	66.689
Berusaha dibantu buruh tetap	16.226	7.156	23.382
Buruh/Karyawan/Pegawai	160.056	122.713	282.769
Pekerja bebas	20.837	5.808	26.645
Pekerja keluarga/tak dibayar	16.230	44.403	60.633
Jumlah	318.107	267.518	585.625

Dari perspektif daya dukung sosial-ekonomi, angka kemiskinan di Bantul pada

2024 tercatat 10,87 persen, dengan sekitar 35,2 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Sektor tambang hanya menyumbang sekitar 1,2 persen terhadap PDRB, sedangkan jumlah UMKM aktif mencapai ± 3.200 unit. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada angka 66,4 (kategori sedang), dengan tren penurunan kualitas air di pesisir selatan akibat aktivitas ekonomi dan pariwisata yang intensif.

Tabel 2. 13 Daya Dukung Sosial-Ekonomi Bantul (Sumber, BPS Kab Bantul)

Indikator	Nilai (2024)
Angka Kemiskinan	10,87%
Kontribusi sektor pertanian	35,2% tenaga kerja
Kontribusi sektor tambang	$\pm 1,2\%$ PDRB
Jumlah UMKM aktif	± 3.200 unit
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,4 (kategori sedang)

Sektor unggulan Bantul tetap didominasi industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pariwisata. UMKM serta industri kecil-menengah menjadi tulang punggung perekonomian, meski masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada aktivitas informal dan keterbatasan hilirisasi produk. Dalam konteks kawasan tambang, kegiatan PPM diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat melalui usaha penunjang tambang seperti transportasi material, penyediaan konsumsi bagi pekerja, hingga pengolahan limbah tambang.

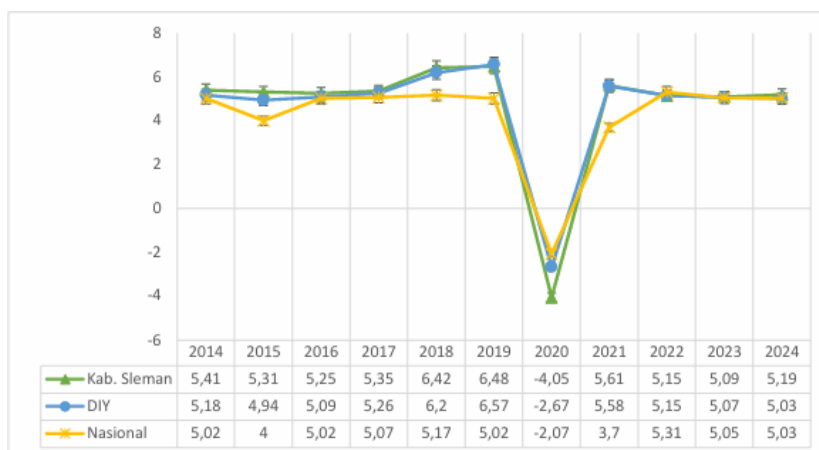
Perekonomian masyarakat sekitar tambang, khususnya di wilayah selatan Bantul, umumnya masih bersandar pada kegiatan rumah tangga, pertanian, dan jasa informal. Kontribusi tambang terhadap kesejahteraan lokal masih terbatas. Oleh karena itu, program PPM diarahkan pada penguatan ekonomi produktif melalui pelatihan menjahit, pengembangan usaha rumah tangga, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda. Ke depan, peluang pengembangan usaha penunjang tambang seperti bengkel, jasa transportasi, pengolahan limbah, serta digitalisasi pemasaran produk lokal berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi pascatambang sekaligus menjaga nilai budaya dan kelestarian lingkungan.

II.2.3.4 Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan perekonomian paling maju di DIY, ditopang oleh sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Pertambangan pasir di lereng Merapi turut menyerap tenaga kerja informal, terutama di wilayah utara, meskipun aktivitasnya masih cenderung manual, tidak berkelanjutan,

dan berisiko terhadap kelestarian lingkungan.

Selama periode 2018–2023, dinamika laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman dipengaruhi secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi cukup dalam hingga $-4,05$ persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini sejalan dengan kontraksi yang dialami oleh DIY dan Indonesia secara keseluruhan akibat pandemi. Pemulihan mulai terjadi pada 2021, di mana pertumbuhan kembali positif, dan bahkan pada 2021, 2023, serta 2024 laju pertumbuhan Sleman tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai $5,19$ persen, tertinggi di DIY, dengan PDRB per kapita sebesar Rp51,35 juta, jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Tren ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Sleman memiliki daya tahan yang relatif kuat.

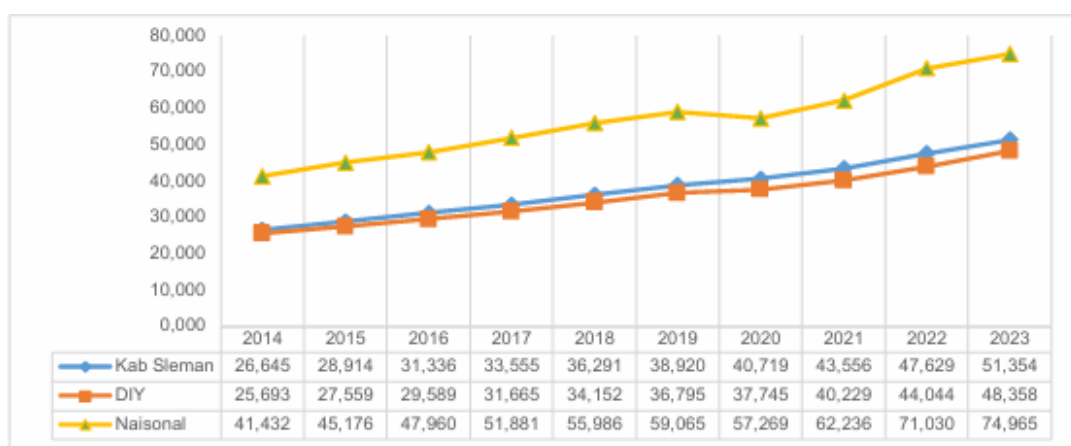


Gambar 2. 10 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2014-2024 (%) (Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, beberapa tahun diolah)

Jika ditinjau dari sektoral, pada tahun 2020 hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi. Namun, pada 2021 beberapa sektor mulai kembali tumbuh positif, meskipun masih ada sektor yang tumbuh negatif seperti tambang dan penggalian, transportasi, serta administrasi pemerintahan. Pertumbuhan terbesar justru datang dari sektor informasi dan komunikasi. Sejak 2022, seluruh sektor kembali tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan tertinggi pada transportasi dan perdagangan serta akomodasi makan-minum, seiring berakhirnya pembatasan aktivitas masyarakat. Sementara itu, sektor pendidikan yang semula terdorong oleh pembelajaran daring pasca-pandemi kembali mengalami normalisasi seiring kembalinya pembelajaran tatap muka.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan yang penting untuk ditinjau adalah PDRB per kapita. Dalam kurun 10 tahun terakhir, PDRB per kapita

Sleman selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi DIY, meskipun masih lebih rendah dari nasional. Pada tahun 2023, misalnya, PDRB per kapita Sleman tercatat sebesar Rp51,35 juta, lebih tinggi daripada DIY yang mencapai Rp48,36 juta, namun masih tertinggal dibandingkan nasional yang telah mencapai Rp74,97 juta. Secara tren, PDRB per kapita Sleman menunjukkan pertumbuhan positif rata-rata 7,68 persen per tahun, atau 7,99 persen jika periode pandemi tidak diperhitungkan. Pencapaian ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, meskipun kesenjangan dengan rata-rata nasional masih cukup besar. Untuk itu, strategi pembangunan diarahkan pada optimalisasi penggunaan pendapatan per kapita agar tidak hanya terserap dalam konsumsi, tetapi juga diinvestasikan pada pengembangan SDM dan penguatan modal produktif.



Gambar 2. 11 PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2014 – 2023 (Sumber: BPS tahun 2014-2023)

Dari sisi ketenagakerjaan, Sleman mencatat jumlah penduduk bekerja tertinggi di DIY, yakni 701.123 jiwa, dengan dominasi laki-laki (392.033 jiwa). Status pekerjaan utama didominasi oleh buruh/karyawan (339.612 jiwa), pelaku usaha mandiri (141.823 jiwa), dan pekerja keluarga/tidak dibayar (73.075 jiwa). Struktur ketenagakerjaan menunjukkan dominasi sektor jasa dan formal, dengan partisipasi kerja yang tinggi serta distribusi gender yang relatif proporsional.

Dari perspektif daya dukung sosial-ekonomi, angka kemiskinan Sleman pada 2024 tercatat 9,12 persen, terendah di DIY. Sektor informal menyerap $\pm 28,4$ persen tenaga kerja, sementara sektor pariwisata menyumbang sekitar 40 persen PDRB. Jumlah UMKM aktif mencapai ± 4.500 unit, yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Daya dukung lingkungan tergolong baik dengan IKLH sebesar 74,5. Namun, wilayah lereng Merapi memiliki Indeks Risiko Bencana tertinggi di DIY (7,8 kategori tinggi), sehingga kegiatan tambang di kawasan

ini perlu diimbangi dengan mitigasi risiko bencana dan perlindungan lingkungan.

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa) (Sumber : BPS Kab Sleman, 2024)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	83.336	58.487	141.823
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	44.179	42.434	86.613
Berusaha dibantu buruh tetap	15.385	8.064	23.449
Buruh/karyawan	192.863	146.749	339.612
Pekerja bebas di pertanian	7.635	4.697	12.332
Pekerja bebas non pertanian	23.546	673	24.219
Pekerja keluarga/tak dibayar	25.098	47.986	73.075
Jumlah	392.033	309.090	701.123

Tabel 2. 15 Daya Dukung Sosial-Ekonomi Sleman (Sumber, BPS Kab Sleman)

Indikator	Nilai (2024)
Angka Kemiskinan	9,12%
Kontribusi sektor informal	28,4% tenaga kerja
Kontribusi sektor pariwisata	±40% PDRB
Jumlah UMKM aktif	±4.500 unit
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,5 (kategori baik)
Indeks Risiko Bencana Merapi	7,8 (kategori tinggi)

Meski memiliki keunggulan ekonomi, Sleman masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antarwilayah, urbanisasi tinggi, dan tekanan lahan akibat pembangunan infrastruktur. Dalam konteks masyarakat sekitar tambang, keterbatasan akses terhadap ekonomi digital dan pelatihan usaha menjadi hambatan bagi masyarakat untuk lepas dari ketergantungan tambang manual.

Oleh karena itu, Program PPM di Sleman diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi pascatambang melalui diversifikasi usaha, pelatihan wirausaha, dan peningkatan literasi keuangan. Pemanfaatan keunggulan Sleman di sektor pendidikan dan UMKM kreatif juga dapat menjadi basis pengembangan SDM dan inovasi usaha. Ke depan, strategi pengembangan ekonomi alternatif berbasis wisata, pertanian, dan peternakan lokal di wilayah Cangkringan diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi risiko sosial-ekonomi akibat ketergantungan pada tambang pasir Merapi.

II.2.3 Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang

II.2.4.1 Sosial Budaya Kabupaten Gunungkidul

Masyarakat Gunungkidul memiliki karakter sosial budaya yang kuat berbasis

nilai-nilai lokal, kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Tradisi seperti wayang, ketoprak, reog, rasulan, serta kesenian lokal lainnya masih bertahan dan menjadi identitas budaya masyarakat. Nilai-nilai ini turut memperkuat ikatan sosial antarwarga dan menjadi modal sosial dalam menghadapi dinamika pembangunan.

Saat ini, kondisi sosial budaya Gunungkidul juga dipengaruhi oleh arus modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya mobilitas penduduk. Banyak generasi muda memilih merantau ke kota untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan, sehingga di sejumlah desa masih didominasi kelompok usia lanjut. Meski demikian, peran perempuan dan pemuda tetap signifikan dalam kegiatan komunitas, baik melalui kelompok kesenian, karang taruna, maupun kegiatan keagamaan dan sosial desa. Tantangan lain yang muncul adalah disparitas akses terhadap pendidikan, sanitasi, dan air bersih, khususnya di wilayah pedesaan dan lingkaran tambang.

Struktur ekonomi masyarakat sekitar tambang masih bertumpu pada pertanian dan peternakan, dengan kontribusi sektor tambang yang terbatas sehingga belum berdampak signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi lokal. Hal ini berimplikasi pada masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah lingkaran tambang. Selain itu, kawasan karst dan tebing curam di lokasi tambang rentan mengalami degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Meski demikian, partisipasi warga dalam kegiatan PPM mulai menunjukkan dampak positif, terutama melalui penyediaan lapangan kerja di perusahaan tambang dan bantuan sosial. Ke depan, program PPM perlu diarahkan pada penguatan budaya lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesadaran ekologi masyarakat sekitar tambang. Strategi pemberdayaan juga difokuskan pada pengembangan UMKM, pelatihan agribisnis, dan penguatan ekonomi produktif desa berbasis sektor unggulan lokal seperti pertanian dan peternakan. Selain itu, kegiatan pascatambang perlu mengakomodasi pembangunan infrastruktur air bersih serta pelatihan wirausaha bagi pemuda, sehingga tercipta ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, partisipasi warga dalam kegiatan PPM mulai menunjukkan dampak positif, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja di perusahaan tambang dan pemberian bantuan sosial. Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, program PPM diarahkan pada pengembangan UMKM, pelatihan agribisnis, dan penguatan ekonomi produktif desa berbasis sektor unggulan lokal seperti pertanian dan peternakan. Kegiatan pascatambang juga perlu mengakomodasi dukungan infrastruktur air bersih dan pelatihan wirausaha bagi pemuda.

II.2.4.2 Sosial Budaya Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo dikenal dengan kekayaan budaya agrarisnya yang masih lestari hingga kini. Tradisi upacara adat seperti Wiwitan (syukuran panen padi) dan Nyadran (ritual doa leluhur) masih rutin dilaksanakan di tingkat pedukuhan, memperlihatkan kuatnya ikatan sosial berbasis kearifan lokal. Kehidupan masyarakat juga ditopang oleh nilai gotong royong, tradisi kesenian rakyat seperti jathilan dan karawitan, serta aktivitas keagamaan yang menjadi perekat sosial.

Dari sisi sosial-ekonomi, masyarakat lingkaran tambang di Kulon Progo mayoritas masih bergantung pada pertanian, peternakan, dan jasa informal. Sektor pertambangan, khususnya pasir besi dan galian C yang berada di kawasan pesisir, belum mampu memberikan dampak ekonomi langsung secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, keberadaan tambang ini berada di kawasan pesisir yang juga berfungsi sebagai habitat biodiversitas pantai dan kawasan konservasi, sehingga menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tantangan sosial budaya yang muncul saat ini mencakup abrasi pantai, penurunan kualitas air tanah, serta potensi konflik sosial akibat perebutan lahan di wilayah pesisir. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antar masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah kadang memunculkan gesekan sosial. Di sisi pendidikan, akses masyarakat relatif lebih baik dibanding masa lalu, tetapi angka partisipasi sekolah di pedesaan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok perempuan dan keluarga miskin.

Kegiatan PPM yang berjalan sejauh ini telah memberikan kontribusi positif, antara lain melalui pelatihan UKM, pemberian beasiswa, serta bantuan bibit dan kolam ikan. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat agar lebih berdampak luas. Strategi ke depan diarahkan pada pengembangan ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal, sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata, serta pelatihan wirausaha yang menargetkan kelompok perempuan dan pemuda.

Diversifikasi kegiatan ekonomi pascatambang juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada tambang. PPM di Kulon Progo harus diarahkan tidak hanya pada penguatan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial masyarakat dalam menjaga kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup, serta mitigasi konflik sosial berbasis partisipatif. Dengan demikian, keberlanjutan sosial

budaya masyarakat pesisir dapat terjaga, sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

II.2.4.3 Sosial Budaya Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki masyarakat yang relatif heterogen, dengan perpaduan budaya urban dan rural yang membentuk dinamika sosial unik. Seni tradisional seperti gejog lesung, jatilan, dan karawitan masih hidup berdampingan dengan geliat seni modern, termasuk seni rupa, kerajinan, dan pertunjukan kontemporer yang berkembang pesat di kawasan urban Bantul. Kehidupan budaya ini mencerminkan keberlanjutan nilai tradisi sekaligus keterbukaan terhadap modernisasi.

Di wilayah selatan, masyarakat sekitar tambang menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Aktivitas tambang berisiko menimbulkan pencemaran air serta kerusakan lahan pertanian, sementara geliat pariwisata yang semakin berkembang juga membawa potensi dampak terhadap pelestarian budaya lokal jika tidak dikelola secara bijak. Perekonomian masyarakat lingkaran tambang masih bersandar pada kegiatan ekonomi rumah tangga, pertanian, dan jasa informal, dengan kontribusi tambang yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem ekonomi lokal sehingga manfaat langsungnya masih terbatas bagi masyarakat.

Program PPM di Bantul sejauh ini telah menyasar pembangunan ekonomi produktif, seperti pelatihan menjahit, dukungan kegiatan rumah tangga, serta penguatan peran perempuan dan pemuda dalam wirausaha lokal. Untuk memperkuat dampak ekonomi tambang, ke depan perlu dikembangkan usaha penunjang tambang, antara lain bengkel, jasa transportasi, pengolahan limbah, hingga digitalisasi pemasaran produk lokal berbasis komunitas. Upaya ini penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat pascatambang sekaligus menjaga keberlanjutan sosial budaya.

Kondisi sosial budaya Bantul saat ini juga ditandai oleh semakin kuatnya interaksi antara masyarakat lokal dengan aktivitas pariwisata dan urbanisasi. Di satu sisi, pariwisata mendorong pelestarian seni dan budaya tradisional, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa komersialisasi dan pergeseran nilai budaya. Partisipasi generasi muda dalam kegiatan seni tradisi mulai menurun, meskipun muncul inisiatif baru berbasis komunitas yang berupaya menghidupkan kembali tradisi lokal melalui festival budaya dan platform digital. Dari aspek sosial, kesenjangan antara masyarakat urban dan rural masih terlihat, terutama dalam akses pendidikan, keterampilan, serta peluang ekonomi. Oleh karena itu, Program PPM tidak hanya

diarahkan pada penguatan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat nilai-nilai budaya lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mengembangkan kapasitas generasi muda sebagai agen pelestari budaya dan inovator lokal.

II.2.4.4 Sosial Budaya Kabupaten Sleman

Masyarakat Sleman memiliki budaya agraris yang kuat, ditopang dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif tinggi. Tradisi budaya seperti Saparan dan tradisi Merapi masih lestari dan menjadi kekuatan sosial yang khas, terutama di wilayah pedesaan. Kawasan tambang pasir berada di kaki Gunung Merapi yang juga merupakan zona rawan bencana, sehingga kesadaran mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kabupaten Sleman juga memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan maju dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Namun, masyarakat di wilayah tambang pasir lereng Merapi, khususnya di Kecamatan Cangkringan, masih banyak yang menggantungkan hidup pada pekerjaan tambang manual. Ketergantungan ini menimbulkan risiko terhadap kesinambungan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Saat ini, kegiatan PPM di Sleman lebih banyak berfokus pada penguatan infrastruktur dan dukungan sosial, namun belum sepenuhnya menysasar peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, program PPM ke depan disarankan untuk mendorong pengembangan ekonomi alternatif berbasis wisata, pertanian, dan peternakan lokal, termasuk pelatihan usaha kecil serta literasi keuangan, guna menciptakan ketahanan ekonomi pascatambang.

Dari sisi sosial budaya saat ini, Sleman menunjukkan dinamika yang unik. Urbanisasi yang tinggi menjadikan wilayah ini sebagai pusat interaksi antara budaya tradisional dan modern. Seni tradisi seperti karawitan, ketoprak, dan upacara adat masih dilestarikan oleh komunitas lokal, sementara budaya modern tumbuh subur di kawasan perkotaan dan kampus melalui seni musik, teater, hingga industri kreatif digital. Kehadiran perguruan tinggi besar di Sleman juga mendorong terciptanya masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi, terutama di kalangan pemuda. Namun, di wilayah lingkaran Merapi, ketergantungan pada sektor tambang manual membuat sebagian masyarakat kurang terintegrasi dengan arus ekonomi kreatif dan digital yang berkembang di wilayah perkotaan.

Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi, mitigasi risiko bencana Merapi, dan adaptasi terhadap perkembangan budaya modern. Dengan modal sosial berupa gotong royong, kesadaran lingkungan, serta kapasitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah lain, Sleman memiliki potensi besar untuk mengembangkan program PPM berbasis edukasi lingkungan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat pascatambang yang lebih berkelanjutan.

II.2.4 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Sekitar Tambang

Kelembagaan komunitas masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah lingkaran tambang. Peran aktif lembaga masyarakat dalam menyuarakan kepentingan lokal, mengelola potensi desa, serta menjembatani komunikasi dengan pelaku usaha dan pemerintah menjadi elemen krusial dalam keberhasilan program PPM. Meskipun terdapat variasi kapasitas kelembagaan antar kabupaten, upaya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan komunitas menjadi fokus utama dalam pelaksanaan PPM ke depan. Berikut ini kondisi per kabupaten:

II.2.5.1 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Kabupaten Gunungkidul

Kelembagaan komunitas di Gunungkidul relatif aktif, terutama dalam bentuk LPMD, karang taruna, dan kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Di wilayah lingkaran tambang seperti Bedoyo, keberadaan lembaga desa masih menjadi tumpuan utama dalam pengelolaan program sosial dan distribusi bantuan dari perusahaan.

Selain itu, potensi kelembagaan ekonomi masyarakat juga cukup besar. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 283 koperasi aktif yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah koperasi bahkan mencapai 381 unit, terdiri dari 28 KUD, 101 KPRI, 11 KOPKAR, 6 KOPPAS, dan 225 koperasi lainnya. Kapanewon Wonosari mencatat jumlah koperasi terbanyak (58 unit), diikuti oleh Playen dan Ponjong. Jenis koperasi yang dominan adalah KPRI dan koperasi serba usaha, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas simpan pinjam, perdagangan lokal, dan usaha mikro.

Di sisi lain, kelembagaan desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terdapat 141 BUMDes aktif di seluruh kapanewon, dengan konsentrasi tertinggi di Ponjong (13 unit), Playen

(12 unit), dan Karangmojo (11 unit). Keberadaan BUMDes ini menjadi potensi strategis dalam pengelolaan aset desa, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pascatambang.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan dinamika positif, dengan ribuan pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan, kerajinan, dan jasa. Kehadiran koperasi, BUMDes, dan UMKM ini menunjukkan adanya basis ekonomi lokal yang dapat diperkuat melalui program PPM, terutama dalam konteks pascatambang dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 16 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul, DIY. (Sumber :SID Kemendesa 2024)

No.	Kabupaten Gunung Kidul	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	BUMDes
Kapanewon							
1.	Wonosari	5	12	2	1	28	10
2.	Playen	3	9	1	1	22	12
3.	Karangmojo	2	8	1	1	18	11
4.	Semanu	2	7	1	0	15	9
5.	Ponjong	3	10	2	1	20	13
6.	Semin	2	6	0	0	12	8
7.	Nglipar	2	6	1	0	14	10
8.	Patuk	2	7	1	1	16	9
9.	Gedangsari	1	5	0	0	10	8
10.	Ngawen	2	6	1	0	13	10
11.	Tanjungsari	1	5	0	0	9	7
12.	Tepus	1	4	0	0	8	6
13.	Paliyan	1	6	1	1	12	9
14.	Saptosari	1	5	0	0	10	7
15.	Purwosari	0	3	0	0	8	5
16.	Panggang	0	2	0	0	10	7
Jumlah		28	101	11	6	225	141

Namun demikian, kapasitas advokasi dan koordinasi kelembagaan terhadap kegiatan tambang masih lemah. Belum terbentuk forum khusus atau kelembagaan lokal yang berperan langsung dalam pemantauan dan perencanaan PPM secara partisipatif. Oleh karena itu, kegiatan PPM perlu diarahkan pada pembentukan forum masyarakat tambang, pelatihan manajemen organisasi, serta peningkatan peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program pascatambang.

II.2.5.2 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Kabupaten Kulon Progo

Kelembagaan masyarakat di Kulon Progo mencakup kelompok tani, nelayan, PKK, karang taruna, hingga kelompok perempuan dan disabilitas. Dalam wilayah sekitar tambang, beberapa kelompok seperti kelompok nelayan dan koperasi sudah

aktif, namun masih memerlukan penguatan dalam manajemen organisasi dan akses pembiayaan.

Kelembagaan masyarakat di Kulon Progo mencakup kelompok tani, nelayan, PKK, karang taruna, hingga kelompok perempuan dan disabilitas. Dalam wilayah sekitar tambang, beberapa kelompok seperti kelompok nelayan dan koperasi sudah aktif, namun masih memerlukan penguatan dalam manajemen organisasi dan akses pembiayaan. Terdapat pula komunitas adat dan tokoh informal yang berpengaruh dalam proses sosial masyarakat. Upaya penguatan kelembagaan komunitas perlu disinergikan dengan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan lingkungan, serta akses terhadap program pemerintah dan swasta untuk mendukung kemandirian sosial ekonomi masyarakat tambang.

Data tahun 2024 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki total **291 koperasi**, terdiri dari **23 KUD, 80 KPRI, 8 KOPKAR, 2 KOPPAS, dan 178 koperasi lainnya**. Kapanewon Wates dan Sentolo menjadi pusat kelembagaan ekonomi, masing-masing memiliki lebih dari 60 unit koperasi. Jenis koperasi yang dominan adalah KPRI dan koperasi serba usaha, sementara koperasi karyawan dan koperasi pasar masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di Kulon Progo lebih banyak berfungsi sebagai wadah simpan pinjam dan usaha mikro daripada koperasi sektor formal.

Di sisi kelembagaan desa, tercatat **95 BUMDes aktif** yang tersebar di seluruh kapanewon, dengan jumlah tertinggi di Panjatan dan Temon (masing-masing 11 dan 10 unit). Keberadaan BUMDes ini menjadi potensi strategis dalam pengelolaan aset desa, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pascatambang.

Sementara itu, indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan capaian maksimal, yaitu 100% secara konsisten selama lima tahun terakhir. Data ini diperkuat dengan pertumbuhan jumlah unit usaha mikro dari 42.791 unit pada 2021 menjadi 52.404 unit pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan respon adaptif masyarakat pasca-pandemi Covid-19, di mana banyak rumah tangga mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif sumber penghidupan.

Tabel 2. 17 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024)

No.	Kabupaten Kulon Progo	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	BUMDes
Kapanewon							
1.	Wates	4	11	2	1	26	9
2.	Temon	3	9	1	0	22	10
3.	Panjatan	2	8	1	0	18	11
4.	Galur	2	7	0	0	15	9
5.	Lendah	2	6	1	0	14	8
6.	Sentolo	3	10	2	1	20	10
7.	Pengasih	2	8	1	0	17	9
8.	Kokap	2	6	0	0	13	8
9.	Girimulyo	1	5	0	0	12	7
10.	Nanggulan	1	5	0	0	11	7
11.	Kalibawang	1	5	0	0	10	7
Jumlah		23	80	8	2	178	95

Capaian tersebut menegaskan bahwa ekosistem koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Kulon Progo telah mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi kualitas maupun jumlah pelaku usaha. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan, ke depan diperlukan strategi berupa pembinaan koperasi berbasis sektor potensial, digitalisasi kelembagaan UMKM, serta penguatan akses pada pembiayaan dan pasar. Dengan demikian, koperasi dan UMKM dapat berperan sebagai fondasi ekonomi lokal yang lebih kuat sekaligus mendorong inklusi ekonomi masyarakat sekitar tambang.

II.2.5.3 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Kabupaten Bantul

Pada beberapa daerah di Kabupaten Bantul, kelembagaan masyarakat masih bersifat informal, dan belum terorganisasi secara khusus dalam pengelolaan kegiatan tambang maupun PPM. Bantuan yang diberikan oleh pelaku tambang masih bersifat individual dan langsung melalui kepala dusun, tanpa mekanisme distribusi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan kelembagaan lokal seperti forum warga atau kelompok dampingan tambang untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan PPM ke depan dapat difokuskan pada pelatihan manajemen komunitas, penguatan koperasi lokal, serta pengorganisasian kelompok usaha berbasis masyarakat untuk mendukung ketahanan ekonomi pascatambang.

Selain kelembagaan sosial, aspek kelembagaan ekonomi juga penting diperhatikan. Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang memiliki peran strategis

adalah koperasi berbadan hukum, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembinaan dan pengawasan. Jumlah koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 tercatat sebanyak 360 unit, terdiri dari 223 koperasi aktif (61,94%) dan 137 koperasi tidak aktif (38,05%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 koperasi tidak aktif masih dalam proses pembubaran oleh Kemenkop UKM RI.

Tabel 2. 18 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024)

No.	Kabupaten Bantul	Koperasi Aktif	BUMDes (terdaftar)
Kapanewon			
1.	Srandakan	3	8
2.	Sanden	13	9
3.	Kretek	5	7
4.	Pundong	5	6
5.	Bambanglipuro	9	7
6.	Pandak	10	8
7.	Bantul	54	0
8.	Jetis	9	7
9.	Imogiri	18	10
10.	Dlingo	11	9
11.	Pleret	4	6
12.	Piyungan	9	7
13.	Banguntapan	15	0
14.	Sewon	23	0
15.	Kasihan	16	0
16.	Pajangan	4	6
17.	Sedayu	15	0
Jumlah		223	90

Sebaran koperasi aktif di Bantul menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah urban seperti Kecamatan Bantul (54 unit), Sewon (23 unit), Kasihan (16 unit), dan Banguntapan (15 unit). Namun, wilayah-wilayah tersebut tidak tercatat memiliki BUMDes aktif, menandakan dominasi kelembagaan ekonomi non-desa yang lebih berorientasi pada sektor jasa dan perdagangan. Sebaliknya, wilayah selatan seperti Imogiri, Dlingo, Sanden, dan Pandak menunjukkan keseimbangan antara koperasi dan BUMDes, mencerminkan struktur ekonomi berbasis desa yang lebih kuat. Secara keseluruhan, terdapat **90 BUMDes terdaftar**, dengan jumlah tertinggi di Imogiri (10 unit), Sanden dan Dlingo (masing-masing 9 unit), serta Pandak dan Srandakan (8 unit).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah koperasi aktif menurun 13 unit, dari 236 koperasi aktif pada 2023 menjadi 223 pada 2024. Penurunan ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembaruan big data koperasi 2024, (2) adanya 2 koperasi aktif yang pindah badan hukum ke Provinsi DIY, (3) perubahan tata kelola dan kinerja koperasi akibat regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta (4) ketidakdisiplinan koperasi dalam melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut atau menyampaikan laporan keuangan secara tertulis.

Tabel 2. 19 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2020-2024. (Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025)

Jenis Koperasi	2020			2021			2022			2023			2024		
	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
Koperasi Simpan Pinjam	107	14	121	107	15	122	97	24	121	88	35	123	84	41	125
Koperasi Produsen	35	5	40	36	5	41	36	8	44	31	14	45	33	14	47
Koperasi Konsumen	118	32	150	117	31	148	105	43	148	91	60	151	81	68	149
Koperasi Jasa	36	1	37	38	2	40	35	6	41	24	12	36	23	13	36
Koperasi Pemasaran	3	0	3	3	1	4	3	1	4	2	1	3	2	1	3
Jumlah	299	52	351	301	54	355	276	82	358	236	122	358	223	137	360

Kondisi menurunnya jumlah koperasi aktif ini, apabila tidak diantisipasi dengan baik, berpotensi berdampak pada penurunan jumlah koperasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan koperasi lokal di sekitar tambang menjadi sangat relevan, baik sebagai sarana kelembagaan ekonomi masyarakat maupun sebagai instrumen penting dalam program PPM, khususnya untuk membangun ekonomi pascatambang yang lebih berkelanjutan.

II.2.5.4 Kelembagaan Komunitas Masyarakat Kabupaten Sleman

Kelembagaan komunitas di Kepuharjo dan Umbulharjo cukup aktif, terutama melalui peran karang taruna, tokoh adat, dan komunitas warga yang bekerja lintas sektor (pariwisata, pertanian, tambang). Pemerintah desa berperan kuat dalam mengelola bantuan dari perusahaan, namun belum ada mekanisme khusus yang melibatkan komunitas dalam penyusunan dan evaluasi PPM. Saran dari masyarakat Cangkringan mengarah pada perlunya sinergi lintas sektor antar komunitas, khususnya untuk mendorong integrasi kegiatan PPM dengan sektor pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, program PPM perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan berbasis kearifan lokal, pelatihan manajerial kelembagaan, serta pembentukan forum desa tambang yang inklusif untuk mendukung pembangunan partisipatif.

Selain kelembagaan sosial, dukungan kelembagaan ekonomi di Sleman juga tercermin dari perkembangan koperasi dan UMKM. Koperasi masih menjadi salah satu soko guru perekonomian masyarakat meskipun tren keberadaannya menunjukkan penurunan dalam hal persentase koperasi aktif. Pada tahun 2024 tercatat 421 unit

koperasi, meningkat dari 419 unit pada 2022. Namun, dari jumlah tersebut hanya 329 koperasi yang aktif, dengan persentase koperasi aktif sebesar 78,15%, turun cukup signifikan dibandingkan 93,41% pada 2019. Data sebaran koperasi menurut jenis menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki total **486 koperasi**, terdiri dari **13 KUD, 97 KPRI, 36 KOPKAR, 18 KOPPAS, dan 322 koperasi lainnya**. Kapanewon Sleman, Ngaglik, Depok, dan Kalasan mencatat jumlah koperasi tertinggi, dengan dominasi koperasi karyawan dan koperasi serba usaha. Wilayah urban seperti Depok dan Gamping memiliki koperasi aktif yang tinggi namun tidak memiliki BUMDes, menandakan orientasi kelembagaan ekonomi yang lebih ke sektor jasa dan perdagangan. Sebaliknya, wilayah seperti Cangkringan, Turi, dan Pakem menunjukkan keseimbangan antara koperasi dan BUMDes, mencerminkan struktur ekonomi berbasis desa dan pertanian.

Tabel 2.20 Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman, DIY. (Sumber : SID Kemendesa 2024)

No	Kabupaten Sleman	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	BUMDes
Kapanewon							
1.	Sleman	2	9	3	2	28	6
2.	Tempel	1	7	2	1	22	5
3.	Turi	1	6	1	0	18	5
4.	Pakem	1	6	2	1	20	4
5.	Cangkringan	1	5	1	0	16	4
6.	Ngemplak	1	7	3	2	24	5
7.	Ngaglik	1	8	4	2	30	4
8.	Depok	0	10	5	3	40	0
9.	Berbah	1	6	2	1	20	4
10.	Prambanan	2	8	3	1	26	5
11.	Kalasan	1	10	4	2	32	5
12.	Gamping	0	9	4	2	28	0
13.	Moyudan	1	6	2	1	18	4
Jumlah		13	97	36	18	322	51

Tercatat pula **51 BUMDes aktif** di seluruh kapanewon, dengan jumlah tertinggi di Sleman, Prambanan, dan Kalasan. Keberadaan BUMDes ini menjadi potensi strategis dalam pengelolaan aset desa, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pascatambang

Sementara itu, usaha mikro dan kecil tetap memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, baik dari sisi produksi, distribusi barang dan jasa, maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah usaha mikro di Sleman meningkat pesat dari 90.535 unit pada 2022 menjadi 109.961 unit pada 2024. Demikian pula, jumlah UMKM

bertambah dari 89.871 unit pada 2022 menjadi 110.142 unit pada 2024. Meskipun secara kuantitas bertambah, persentase usaha mikro dan kecil sedikit menurun dari 99,98% menjadi 99,84%.

Data ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas, khususnya koperasi dan UMKM, sangat relevan untuk diintegrasikan dengan program PPM di kawasan tambang. Dengan mendorong koperasi dan UMKM sebagai wadah ekonomi bersama, masyarakat sekitar tambang dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap modal, pasar, dan pengembangan usaha, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal yang berkelanjutan.

II.2.5 Infrastruktur Sekitar Tambang

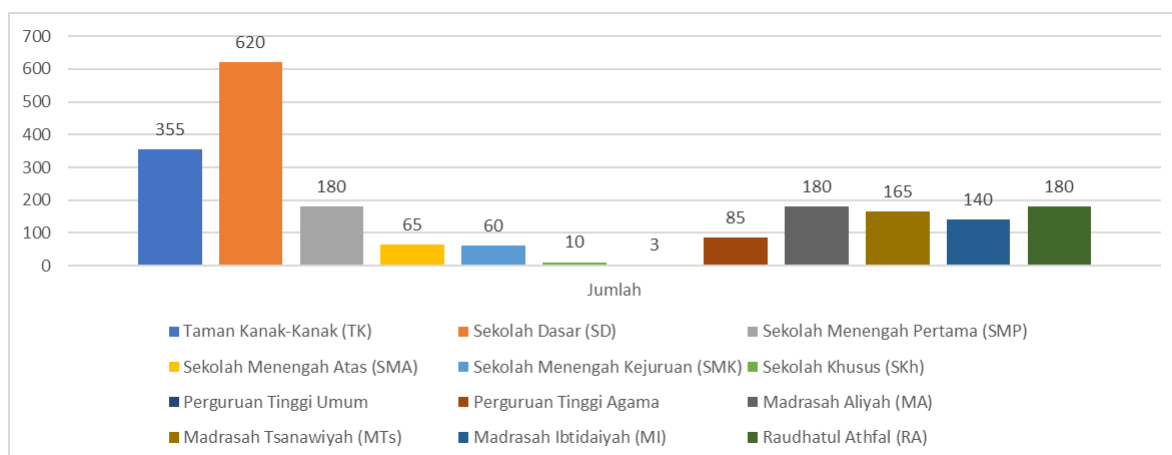
Pembangunan infrastruktur di wilayah lingkaran tambang menjadi salah satu perhatian utama dalam mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah akses transportasi hasil tambang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar seperti listrik, air bersih, jalan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut ini kondisi infrastruktur di wilayah sekitar tambang per kabupaten:

II.2.6.1 Infrastruktur Sekitar Tambang Kabupaten Gunungkidul

Wilayah tambang di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Kalurahan Bedoyo, memiliki sejumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun atas kontribusi pelaku usaha seperti PT Sugih Alamnugroho. Infrastruktur yang sudah terealisasi mencakup perkerasan jalan desa, pembangunan rumah warga kurang mampu, serta bantuan pembangunan mushola dan masjid. Selain itu, perusahaan turut berkontribusi dalam program bedah rumah dan bantuan dana sosial langsung ke masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, Gunungkidul memiliki 620 Sekolah Dasar (SD) dan 355 Taman Kanak-Kanak (TK), menandakan fokus kuat pada pendidikan dasar dan usia dini di wilayah yang didominasi oleh karakter rural. Jumlah lembaga pendidikan menengah seperti SMP (180 unit) dan MA (180 unit) juga menunjukkan upaya pemerataan akses pendidikan lanjutan. Keberadaan 85 Perguruan Tinggi Agama dan 3 Perguruan Tinggi Umum memperlihatkan bahwa meskipun skalanya lebih kecil, Gunungkidul tetap berkomitmen terhadap pendidikan tinggi. Distribusi ini mencerminkan tantangan geografis dan demografis yang dihadapi, sekaligus menunjukkan arah kebijakan yang mendukung inklusi pendidikan di wilayah

perdesaan.



Gambar 2.12 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Gunung Kidul

Dalam konteks pendidikan, Gunungkidul memiliki 620 Sekolah Dasar (SD) dan 355 Taman Kanak-Kanak (TK), menandakan fokus kuat pada pendidikan dasar dan usia dini di wilayah yang didominasi oleh karakter rural. Jumlah lembaga pendidikan menengah seperti SMP (180 unit) dan MA (180 unit) juga menunjukkan upaya pemerataan akses pendidikan lanjutan. Keberadaan 85 Perguruan Tinggi Agama dan 3 Perguruan Tinggi Umum memperlihatkan bahwa meskipun skalanya lebih kecil, Gunungkidul tetap berkomitmen terhadap pendidikan tinggi. Distribusi ini mencerminkan tantangan geografis dan demografis yang dihadapi, sekaligus menunjukkan arah kebijakan yang mendukung inklusi pendidikan di wilayah perdesaan.

Tabel 2.21 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024

No.	Kabupaten Gunung Kidul	Jumlah
Fasilitas Kesehatan		
1.	Rumah Sakit Umum	5
2.	Rumah Sakit Khusus	1
3.	Puskesmas	30
4.	Klinik Pratama	35
5.	Apotek	80
6.	Laboratorium Kesehatan	2
7.	Poskesdes	130
8.	Praktik Dokter Mandiri	60
Jumlah		343

Dari sisi kesehatan, Gunungkidul memiliki 5 rumah sakit umum, 1 rumah sakit

husus, 30 puskesmas, dan 35 klinik pratama. Akses layanan primer diperkuat oleh 80 apotek dan 60 praktik dokter mandiri. Keberadaan 130 poskesdes menunjukkan cakupan pelayanan desa yang luas, meskipun laboratorium kesehatan masih terbatas (2 unit). Infrastruktur ini penting untuk mendukung kesehatan masyarakat sekitar tambang batu gamping, terutama dalam hal akses, pencegahan penyakit, dan layanan rujukan.

Tabel 2.22 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024

No.	Kabupaten Gunung Kidul	Jumlah	Nama Pasar Tradisional
Kecamatan			
1.	Semanu	8	Pasar Umum Munggi, Pasar Semuluh, Pasar Somermo, Pasar Ngenep, Pasar Memble, Pasar Candi, Pasar Mengguno, Pasar Gondang
2.	Ponjong	8	Pasar Surodadi, Pasar Menggunan, Pasar Petoyan, Pasar Ceper, Pasar Kuwon, Pasar Bedoyo, Pasar Klampok, Pasar Karang Ijo
3.	Wonosari	11	Pasar Gondang, Pasar Argosari, Pasar Pahing, Pasar Karang Tengah, Pasar Ekologi Argowijil, Pasar Taman Parkir, Pasar Taman Kuliner, Pasar Mulo, Pasar Wareg, Pasar Legi, Pasar Wage, Pasar Pulutan
4.	Playen	7	Pasar Banaran, Pasar Gading, Pasar Plembang, Pasar Ngunut, Pasar Gojo, Pasar Pojok Getas, Pasar Menthel (Pon), Pasar Playen
5.	Karangmojo	9	Pasar Wonotopo, Pasar Candi, Pasar Ngawis 2 (Pon), Pasar Gedangan, Pasar Wiyoko, Pasar Sokoliman (Bejiharjo), Pasar Pon, Pasar Jaten, Pasar Wilayu, Pasar Pon (Wiladeg)
6.	Panggang	4	Pasar Panggang, Pasar Dakbong, Pasar Temu Ireng I, Pasar Trembono
7.	Purwosari	1	Pasar Karang Tengah
8.	Saptosari	3	Pasar Bibis, Pasar Legundi, Pasar Ngloro
9.	Tepus	3	Pasar Tepus, Pasar Trowono, Pasar Tepus
10.	Tanjungsari	4	Pasar Desa Kemadang, Pasar Glagah, Pasar Tanjung, Pasar Argosari
11.	Rongkop	5	Pasar Baran, Pasar Kamal, Pasar Dung Bonang, Pasar Besole, Pasar Dondong
12.	Girisubo	7	Pasar Jepitu, Pasar Padem, Pasar Panggul, Pasar Wangon, Pasar Njowa, Pasar Regedeg, Pasar Padangan
13.	Semin	2	Pasar Banyu Bening, Pasar Semin

14.	Nglipar	3	Pasar Menggoro, Pasar Nglipar, Pasar Katongan
15.	Gedangsari	5	Pasar Ngalang, Pasar Tawang, Pasar Mertelu, Pasar Randukuning, Pasar Cuwelo
16.	Paliyan	4	Pasar Ngrancah, Pasar Grogol 3 (Wage), Pasar Pahing, Pasar Sodo
17.	Patuk	5	Pasar Nglegi, Pasar Wage Jimbaran, Pasar Pahing Tengeran, Pasar Wotgaleh, Pasar Kepuh
18.	Ngawen	2	Pasar Ngawen, Pasar Sambeng
19.	Kulon Progo	1	Pasar Wates
Jumlah		92	0

Selain pendidikan dan kesehatan, aspek ekonomi lokal juga tercermin dari keberadaan pasar tradisional yang tersebar luas di seluruh kecamatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki total 92 pasar tradisional, menjadikannya wilayah dengan jumlah pasar terbanyak di DIY. Kecamatan Wonosari sebagai pusat kabupaten memiliki 11 pasar, diikuti oleh Karangmojo (9 pasar) serta Semanu dan Ponjong (masing-masing 8 pasar). Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan rakyat tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran seperti Girisubo, Rongkop, dan Patuk.

Keberadaan pasar-pasar seperti Pasar Wage, Pasar Pahing, dan Pasar Pon juga mencerminkan pola operasional berbasis hari pasaran tradisional, yang masih menjadi bagian penting dari ritme ekonomi masyarakat. Pasar tradisional berfungsi sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok, tempat interaksi sosial, serta wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro. Dalam konteks wilayah tambang, pasar-pasar ini berperan sebagai titik sirkulasi hasil produksi lokal dan menjadi indikator vitalitas ekonomi desa.

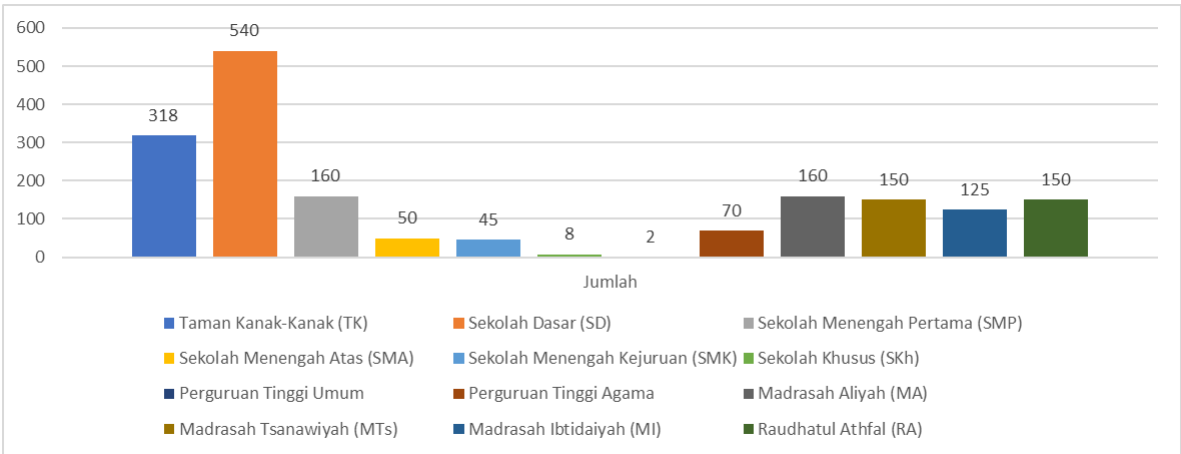
Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek konektivitas jalan menuju lokasi tambang yang berada di perbukitan batu gamping. Kebutuhan terhadap penguatan jaringan air bersih dan sarana produksi masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat menjadi strategi yang disarankan dalam PPM mendatang.

II.2.6.2 Infrastruktur Sekitar Tambang Kabupaten Kulon Progo

Infrastruktur di wilayah tambang Kalurahan Hargorejo dan Kalirejo di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan dukungan dari perusahaan tambang seperti CV Handika Karya. Kontribusi tersebut antara lain pembangunan jalan desa, kompensasi perkerasan jalan untuk rumah warga yang dilalui truk tambang, pembangunan balai

makam desa, serta dukungan fasilitas kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Infrastruktur di wilayah tambang Kalurahan Hargorejo dan Kalirejo di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan dukungan dari perusahaan tambang seperti CV Handika Karya. Kontribusi tersebut antara lain pembangunan jalan desa, kompensasi perkerasan jalan untuk rumah warga yang dilalui truk tambang, pembangunan balai makam desa, serta dukungan fasilitas kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.



Gambar 2. 13 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024

Kulon Progo mencatat 540 SD dan 318 TK, dengan distribusi lembaga pendidikan menengah yang lebih terbatas (160 SMP dan 50 SMA). Jumlah lembaga pendidikan keagamaan seperti MA (160 unit) dan MTs (150 unit) cukup signifikan, menunjukkan peran penting institusi keagamaan dalam pendidikan lokal. Dengan hanya 2 Perguruan Tinggi Umum dan 70 Perguruan Tinggi Agama, Kulon Progo menghadapi tantangan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Namun, pola distribusi ini sejalan dengan karakter wilayah yang lebih rural dan tersebar, serta menunjukkan potensi penguatan pendidikan berbasis komunitas dan nilai lokal.

Dalam bidang pendidikan, Kulon Progo memiliki distribusi lembaga pendidikan yang cukup merata, meskipun tidak sebanyak kabupaten lain. Fokus utama terlihat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan dukungan lembaga keagamaan yang cukup signifikan.

Tabel 2.23 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah
Fasilitas Kesehatan		
1.	Rumah Sakit Umum	4

2.	Rumah Sakit Khusus	1
3.	Puskesmas	20
4.	Klinik Pratama	28
5.	Apotek	65
6.	Laboratorium Kesehatan	2
7.	Poskesdes	100
8.	Praktik Dokter Mandiri	50
Jumlah		270

Fasilitas kesehatan di Kulon Progo mencakup 4 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 20 puskesmas, dan 28 klinik pratama. Layanan primer diperkuat oleh 65 apotek dan 50 praktik dokter mandiri. Keberadaan 100 poskesdes menunjukkan komitmen terhadap pelayanan kesehatan desa, meskipun laboratorium kesehatan masih terbatas (2 unit). Infrastruktur ini menjadi penting dalam mendukung masyarakat lingkaran tambang, terutama untuk layanan preventif, kesehatan ibu-anak, dan penanganan dampak lingkungan tambang terhadap kesehatan.

Tabel 2. 24 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah	Nama Pasar Tradisional
Kecamatan			
1.	Galur	5	Pasar Kranggan (Kliwon), Pasar Brosot, Pasar Desa Pringtali, Pasar Sewu Galur, Pasar Cikli
2.	Kalibawang	8	Pasar Desa Degan, Pasar Bendo, Pasar Desa Boro, Pasar Tuk Bujel, Pasar Dekso, Pasar Klargon, Pasar Jagalan, Pasar Plono, Pasar Desa Demangan
3.	Kokap	8	Pasar Pripih, Pasar Desa Cublak, Pasar Desa Sidodadi, Pasar Kokap/Pasar Desa Ngaseman, Pasar Desa Girinyono, Pasar Menguri, Pasar Desa Gunung Ijo, Pasar Desa Klepu
4.	Lendah	5	Pasar Bangeran, Pasar Desa Degolan, Pasar Desa Gorolangu, Pasar Kasihan, Pasar Desa Gegulu
5.	Nanggulan	8	Pasar Desa Kembang, Pasar Desa Krambilan, Pasar Gajuk (Gejlik), Pasar Nanggulan, Pasar Bogo, Pasar Gunung Gamping, Pasar Mudal, Pasar Kenteng
6.	Panjatan	4	Pasar Ngebung, Pasar Desa Krembangan, Pasar Desa Panjatan, Pasar Panjatan

7.	Pengasih	5	Pasar Semawung, Pasar Milir, Pasar Potrogaten, Pasar Clereng, Pasar Gunung Gondang
8.	Samigaluh	1	Pasar Samigaluh
9.	Sentolo	11	Pasar Glaeng, Pasar Ngaglik (Pon), Pasar Desa Panjul, Pasar Nganggrung, Pasar Desa Nyonyol, Pasar Jonggrangan, Pasar Pogog, Pasar Ngangkruk Dhisil/Watu Ombo, Pasar Sentolo Lama, Pasar Sentolo Baru, Pasar Niten/Sribit
10	Temon	5	Pasar Jombakan, Pasar Desa Glagah, Pasar Temon, Pasar Desa Kaligondang, Pasar Dondong Sari
11.	Wates	4	Pasar Teteg Baru (THR), Pasar Pagi Soni, Pasar Bendungan, Pasar Wates
Jumlah		64	0

Selain pendidikan dan kesehatan, dinamika ekonomi lokal juga tercermin dari keberadaan pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Kulon Progo memiliki total 64 pasar tradisional yang tersebar di 11 kecamatan. Kecamatan Sentolo menjadi wilayah dengan jumlah pasar terbanyak (11 pasar), diikuti oleh Kalibawang, Kokap, dan Nanggulan (masing-masing 8 pasar). Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan rakyat tidak hanya terpusat di kota kabupaten, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan dan perbukitan.

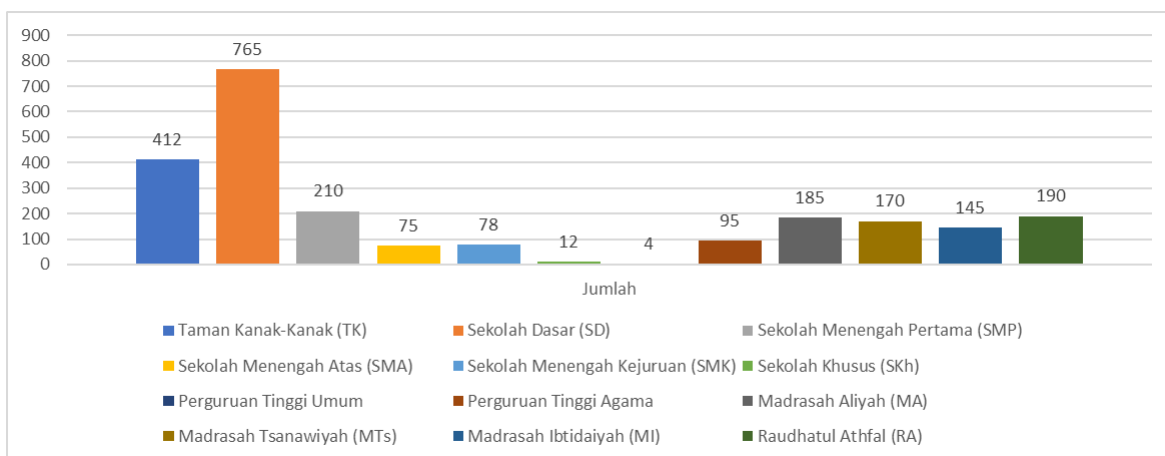
Pasar-pasar seperti Pasar Kranggan (Kliwon), Pasar Ngaglik (Pon), dan Pasar Gajuk (Gejlik) menunjukkan pola operasional berbasis hari pasaran tradisional, yang masih menjadi bagian penting dari ritme ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar ini berfungsi sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok, tempat interaksi sosial, serta wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro. Dalam konteks wilayah tambang, pasar-pasar tersebut menjadi titik sirkulasi hasil produksi lokal dan indikator vitalitas ekonomi desa.

Keterbatasan masih ditemukan pada infrastruktur penunjang produktivitas ekonomi masyarakat, seperti fasilitas pelatihan dan sarana transportasi hasil produksi lokal. Dengan adanya akses yang relatif baik ke kawasan strategis seperti Bandara YIA, kebijakan penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi berbasis desa menjadi prioritas untuk mendukung pemerataan manfaat dari kegiatan tambang.

II.2.6.3 Infrastruktur Sekitar Tambang Kabupaten Bantul

Infrastruktur dasar di Dusun Sambeng, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, masih terbatas. Bantuan infrastruktur dari penambang

rakyat seperti Pak Nurmanto umumnya berupa dana untuk mendukung pembangunan desa dan fasilitas sosial, namun belum menyentuh sarana fisik seperti jalan produksi atau fasilitas umum lainnya.



Gambar 2. 14 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2024

Bantul menunjukkan kekuatan pada jenjang pendidikan dasar dan usia dini, dengan 765 SD dan 412 TK. Jumlah lembaga pendidikan menengah seperti SMP (210 unit) dan SMA (75 unit) juga cukup tinggi, mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan lanjutan. Di sisi keagamaan, Bantul memiliki 185 MA dan 170 MTs, serta 95 Perguruan Tinggi Agama, menandakan integrasi nilai-nilai religius dalam sistem pendidikan lokal. Karakter Bantul sebagai wilayah semi-urban dengan pertumbuhan penduduk yang stabil tercermin dalam distribusi lembaga pendidikan yang relatif merata.

Tabel 2. 25 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Kabupaten Bantul	Jumlah
Fasilitas Kesehatan		
1.	Rumah Sakit Umum	7
2.	Rumah Sakit Khusus	2
3.	Puskesmas	27
4.	Klinik Pratama	40
5.	Apotek	95
6.	Laboratorium Kesehatan	3
7.	Poskesdes	110
8.	Praktik Dokter Mandiri	70
Jumlah		354

Fasilitas kesehatan di Bantul terdiri dari 7 rumah sakit umum, 2 rumah sakit

khusus, 27 puskesmas, dan 40 klinik pratama. Layanan primer diperkuat oleh 95 apotek dan 70 praktik dokter mandiri. Keberadaan 110 poskesdes dan 3 laboratorium kesehatan menunjukkan kapasitas layanan yang cukup memadai, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Infrastruktur ini menjadi modal penting dalam mendukung PPM berbasis kesehatan komunitas, terutama di wilayah selatan yang dekat dengan lokasi tambang rakyat.

Tabel 2. 26 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Kabupaten Bantul	Jumlah	Nama Pasar Tradisional
Kecamatan			
1.	Banguntapan	5	Pasar Kecil Tamanan, Pasar Ngipik Baru, Pasar Sekarsuli (Potorono)
2.	Dlingo	2	Pasar Dangwesi, Pasar Dlingo
3.	Piyungan	4	Pasar Srimartani, Pasar Piyungan, Pasar Panasan / Wage
4.	Sewon	3	Pasar Kepek, Pasar Gabusan, Pasar Ngoto / Triwindhu
5.	Sanden	2	Pasar Celep, Pasar Sorobayan
6.	Kretek	2	Pasar Angkruksari, Pasar Kretek Abang
7.	Bambanglipuro	2	Pasar Grogol, Pasar Gatak
8.	Pandak	2	Pasar Jodog, Pasar Petung
9.	Imogiri	1	Pasar Mojohuro
10.	Pleret	3	Pasar Jejeran, Pasar Klithikan Lestarmulyo, Pasar Desa Ngablak
11.	Pundong	2	Pasar Jolosutro, Pasar Dodogan
12.	Srandakan	1	Pasar Banjardadap
13.	Kasihan	3	Pasar Janten, Pasar Niten Baru, Pasar Desa Tirtonirmolo
14.	Pajangan	2	Pasar Sudimoro
15.	Sedayu	3	Pasar Klangon, Pasar Purwomarto (Mbabrik)
16.	Bantul	1	Pasar Bantul
Jumlah		38	0

Selain pendidikan dan kesehatan, dinamika ekonomi lokal juga tercermin dari keberadaan pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Bantul memiliki total 38 pasar tradisional yang tersebar di 16 kapanewon. Kecamatan Banguntapan menjadi wilayah dengan jumlah pasar terbanyak (5 pasar), diikuti oleh Piyungan (4 pasar) serta Sewon, Kasihan, dan Sedayu (masing-masing 3 pasar). Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan rakyat di Bantul cukup merata, dengan pasar-pasar yang melayani kebutuhan harian masyarakat di wilayah semi-urban maupun pedesaan.

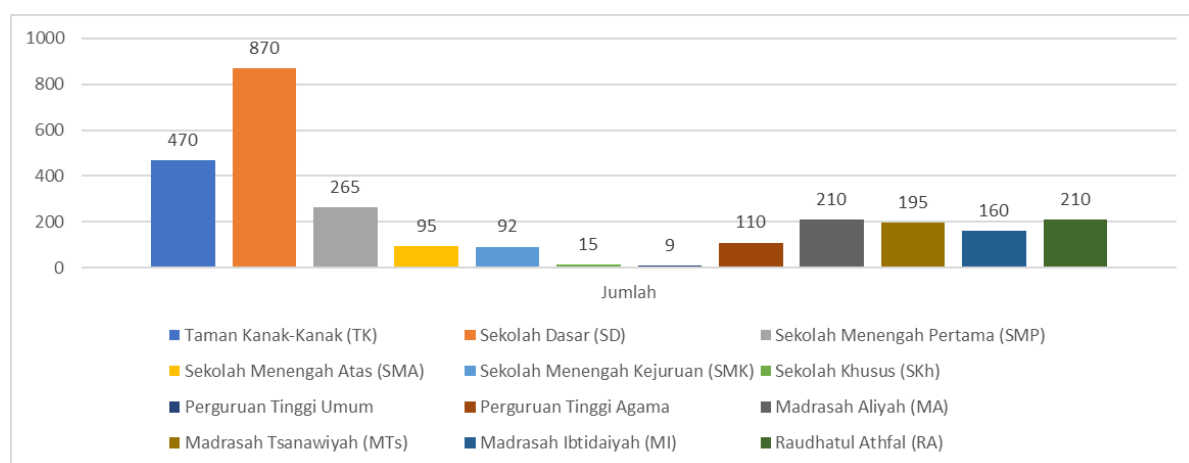
Pasar-pasar seperti Pasar Ngoto/Triwindhu, Pasar Panasan/Wage, dan Pasar Klithikan Lestarmulyo menunjukkan karakter tematik dan berbasis hari pasaran, yang masih menjadi bagian penting dari ritme ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar ini berfungsi sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok, tempat interaksi sosial, serta wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro. Dalam konteks wilayah tambang, pasar-pasar tersebut menjadi titik sirkulasi hasil produksi lokal dan indikator vitalitas ekonomi rumah tangga.

Minimnya intervensi infrastruktur yang terarah menandakan perlunya penyusunan rencana infrastruktur tambang berbasis masyarakat dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan pelaku usaha. PPM di wilayah ini sebaiknya diarahkan pada penyediaan sarana jalan produksi, fasilitas air bersih, serta infrastruktur pendukung ekonomi rumah tangga seperti kios usaha atau tempat pelatihan kerja.

II.2.6.4 Infrastruktur Sekitar Tambang Kabupaten Sleman

Kawasan tambang di Kalurahan Kepuharjo dan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, menunjukkan dukungan infrastruktur yang cukup baik dari perusahaan tambang seperti PT Barokah Sumber Rezeqi. Kontribusi nyata mencakup pembangunan jalan desa, gedung rumah pelayanan, mushola, instalasi listrik, pembangunan lapangan basket, serta fasilitas sosial lainnya.

Kawasan tambang di Kalurahan Kepuharjo dan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, menunjukkan dukungan infrastruktur yang cukup baik dari perusahaan tambang seperti PT Barokah Sumber Rezeqi. Kontribusi nyata mencakup pembangunan jalan desa, gedung rumah pelayanan, mushola, instalasi listrik, pembangunan lapangan basket, serta fasilitas sosial lainnya.



Gambar 2. 15 Grafik Jenis Lembaga Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Sleman menempati posisi terdepan dalam jumlah lembaga pendidikan di DIY. Dengan 870 SD, 265 SMP, dan 210 MA, Sleman menunjukkan dominasi kuat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik umum maupun keagamaan. Jumlah TK yang mencapai 470 unit juga menandakan perhatian terhadap pendidikan usia dini. Selain itu, keberadaan 110 Perguruan Tinggi Agama dan 9 Perguruan Tinggi Umum memperkuat citra Sleman sebagai pusat pendidikan tinggi yang inklusif dan beragam. Infrastruktur pendidikan yang merata ini mendukung posisi Sleman sebagai wilayah penyangga utama Kota Yogyakarta dengan dinamika urban-rural yang seimbang.

Tabel 2.27 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kabupaten Sleman	Jumlah
Fasilitas Kesehatan		
1.	Rumah Sakit Umum	10
2.	Rumah Sakit Khusus	3
3.	Puskesmas	25
4.	Klinik Pratama	48
5.	Apotek	120
6.	Laboratorium Kesehatan	4
7.	Poskesdes	120
8.	Praktik Dokter Mandiri	85
Jumlah		415

Fasilitas kesehatan di Sleman mencakup 10 rumah sakit umum, 3 rumah sakit khusus, 25 puskesmas, dan 48 klinik pratama. Layanan primer diperkuat oleh 120 apotek dan 85 praktik dokter mandiri. Keberadaan 120 poskesdes dan 4 laboratorium kesehatan menunjukkan kapasitas diagnostik dan pelayanan desa yang sangat baik. Infrastruktur ini mendukung ketahanan kesehatan masyarakat, termasuk di wilayah tambang lereng Merapi yang memiliki risiko bencana tinggi.

Tabel 2.28 Sebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kabupaten Sleman	Jumlah	Nama Pasar Tradisional
Kecamatan			
1.	Ngaglik	4	Pasar Manggung; Pasar Rejondani; Pasar Gentan; Pasar Kembang; Pasar Klewonan

2.	Depok	3	Pasar Kolombo; Pasar Gowok (Ambarukmo); Depok Baru (Pasar Setan Maguwoharjo)
3.	Moyudan	3	Pasar Ngijon; Pasar Gamplong; Pasar Semprong
4.	Minggir	5	Pasar Balangan; Pasar Gendengan; Pasar Kebonagung; Pasar Sembuhan; Pasar Srikaton
5.	Godean	2	Pasar Godean; Pasar Pendulan
6.	Gamping	6	Pasar Gamping; Pasar Bronggang; Pasar Bibis (Rewulu); Pasar Tlogorejo; Pasar Sayur dan Buah Gamping; Pasar Sore Gamping; Pasar Balecatur
7.	Sleman	5	Jombor (Pasar Desa Jati); Pasar Kenaran; Sleman (Pasar Sleman); Pasar Denggung; Pasar Sleman Unit 2; Pasar Nambongan; Pasar Cebongan
8.	Berbah	2	Pasar Tegal Sari; Pasar Kliwon Kalitirto
9.	Kalasan	6	Pasar Sorogenen; Pasar Tanjung Indah Tirto; Pasar Tulung; Pasar Sidorejo (Sidorejo Baru); Pasar Kalasan; Pasar Komperta
10.	Cangkringan	4	Pasar Jangkang; Pasar Pundung; Pasar Wonosari Sleman; Pasar Ngawen
11.	Tempel	4	Pasar Gendol; Pasar Tempel (Induk); Pasar Ngemplak; Pasar Buah Tempel
12.	Turi	4	Pasar Ngablak; Pasar Banjar Harjo; Pasar Setum; Pasar Turi; Pasar Balerante
13.	Pakem	5	Pasar Baratan (Magersari); Pasar Sawungan (Purworejo); Pasar Butuh; Pasar Perjuangan Srowolan; Pasar Pakem; Pasar Degolan/Umbul
14.	Seyegan	2	Pasar Ngino; Pasar Krempyeng
15.	Mlati	3	Pasar Sarjito (Resto Sardjito); Pasar Tradisional Jambon; Pasar Kutu
16.	Prambanan	3	Protojayan (Pasar Desa Sorogedug); Pasar Prambanan (Induk); Pasar Randu Alas
17.	Ngemplak	3	Pasar Bimomartani (Rogobangsan); Pasar Jambon; Pasar Nambongan
Jumlah		64	0

Selain pendidikan dan kesehatan, aktivitas ekonomi lokal di Sleman juga tercermin dari keberadaan pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah. Kabupaten Sleman memiliki total 64 pasar tradisional yang tersebar di 17 kapanewon. Kecamatan Gamping menjadi wilayah dengan jumlah pasar terbanyak (7 pasar), diikuti oleh Sleman (6 pasar) dan Kalasan (6 pasar). Sebaran ini menunjukkan bahwa pasar

tradisional di Sleman tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul ekonomi mikro yang mendukung keberlanjutan usaha rumah tangga dan UMKM.

Pasar-pasar seperti Pasar Gamping, Pasar Deggung, Pasar Sleman, dan Pasar Prambanan memiliki peran strategis dalam mendukung sirkulasi barang dan jasa lintas wilayah. Sementara pasar-pasar desa seperti Pasar Ngablak, Pasar Semprong, dan Pasar Klewonan berfungsi sebagai titik interaksi sosial dan ekonomi komunitas lokal. Dalam konteks wilayah tambang, pasar-pasar tersebut menjadi jalur penting distribusi hasil tambang dan produk pendukungnya, sekaligus menjadi indikator vitalitas ekonomi masyarakat lereng Merapi.

Di tengah risiko bencana lereng Merapi, dukungan terhadap infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi dan sistem informasi bencana menjadi perhatian utama. PPM di Sleman dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur berbasis kesiapsiagaan bencana, pengolahan hasil tambang, dan fasilitas publik yang mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan.

II.3. CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM

Berdasarkan data program RKAB yang disetujui oleh pemerintah DIY terhadap pemrakarsa IUP OP di DIY selama tahun 2019 – 2023, dan menurut survey lapangan, menunjukkan kecenderungan PPM yang bersifat charity dimana perusahaan memberikan uang kepada masyarakat berdasarkan proposal yang ditodongkan masyarakat kepada perusahaan. Selain itu, masih belum terdapat komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, pelaku usaha dan masyarakat terkait pelaksanaan PPM.

Perumusan cetak biru PPM pada kegiatan pertambangan DIY didasarkan pada hasil analisis komprehensif berdasarkan program Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pemegang IUP OP di DIY, hasil tinjauan langsung ke lapangan terhadap pelaku usaha tambang serta pemerintah dan masyarakat sekitar tambang serta diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY tahun 2023 - 2027. Cetak biru ini disusun sebagai petunjuk untuk memudahkan pelaku tambang dalam perumusan PPM, dan agar melaksanakan PPM tepat sasaran sesuai dengan SDGs.

Sebagai rujukan utama, blueprint PPM ini mengacu pada **Program Pembangunan Daerah** yang bersifat lintas sektor dan telah dirumuskan dalam RPJMD DIY. Keterkaitan antara **tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah** sebagaimana tercantum

dalam Tabel VI-15 menjadi fondasi dalam menyusun arah dan indikator PPM, yaitu :

- Tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penghidupan layak di daerah tambang dihubungkan dengan indikator **Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI)** dan **Indeks Kebahagiaan**, yang dapat dicapai melalui PPM berbasis sektor unggulan dan kewirausahaan.
- Sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal dalam RPJMD diterjemahkan ke dalam program PPM yang mendukung **pertumbuhan PDRB sektor pertanian, industri, dan UMKM**, serta **rasio kewirausahaan**.
- Tujuan peningkatan kualitas SDM dan pengendalian ketimpangan wilayah menjadi acuan dalam merancang PPM berbasis pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan komunitas, terutama di kabupaten yang belum maju seperti Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul.

Tabel 2. 29 Program Pembangunan Daerah dan Keterkaitan Tujuan, Sasaran, serta Program Pemda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda
Terwujudnya kualitas hidup dan penghidupan masyarakat	1. Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) 2. Indeks Kebahagiaan	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	Pemerataan Kesejahteraan	1. Indeks Gini, 2. Persentase Desa Mandiri
		Pengembangan ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, 2. Pendapatan Per Kapita, 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Inflasi	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengelolaan, dan Akomodasi Makan Minum (%)
				Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)
				Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	Crime Rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)
		Kualitas SDM Yogyakarta dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	HLS, RLS, % sekolah memenuhi SNP, akses internet, laboratorium, perpustakaan, sanitasi layak, air minum layak; Jumlah karya budaya terdaftar; Jumlah WBTB ditetapkan dan dimanfaatkan
				Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Prevalensi Stunting 3. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan
				Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Total Fertility Rate (TFR)
				Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

Tabel. Program Pembangunan Daerah dan Keterkaitan Tujuan, Sasaran, serta Program Pemda (lanjutan)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda
Mengecilnya ketimpangan wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	1. Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, GK, KP)
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO ₂ eq)
				Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	1. Perwujudan pola ruang 2. Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

II.3.1 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Program PPM diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian dan peningkatan IPM daerah, melalui intervensi pada tiga dimensi utama:

- **Pendidikan:** Bantuan pendidikan formal dan non-formal, beasiswa, penguatan sarana sekolah, serta pelatihan vokasional.
- **Kesehatan:** Penyediaan layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi masyarakat, pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan, serta kegiatan promotif dan preventif.
- **Ekonomi:** Dukungan pada usaha mikro dan kecil, pelatihan kewirausahaan, serta akses permodalan yang inklusif.

Program-program ini disesuaikan dengan kondisi demografis dan IPM masing-masing kabupaten/kota di DIY dan dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada wilayah lingkaran tambang.

II.3.1.1 Peningkatan IPM Kabupaten Kulon Progo

PPM di Kabupaten Kulon Progo diarahkan pada **peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat dan infrastruktur kesehatan** melalui:

- **Pemeriksaan kesehatan gratis**, penyuluhan kehamilan, serta promosi pencegahan penyakit menular seperti HIV dan TBC.
- **Pemberian layanan kesehatan ibu dan anak** bekerja sama dengan Posyandu dan fasilitas desa.
- **Penyuluhan gizi keluarga dan peningkatan kapasitas kader posyandu.**
- **Bantuan alat kesehatan dan perbaikan pos kesehatan** di daerah terdampak tambang.
- Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada **penguatan sarana sekolah dan pelatihan berbasis potensi wilayah.**

Pendekatan ini bertujuan membangun masyarakat tambang yang sehat, sadar risiko, dan tangguh secara sosial-ekonomi.

II.3.1.2 Peningkatan IPM Kabupaten Sleman

Program IPM di Sleman memprioritaskan **pelayanan dasar kesehatan** serta peningkatan kesadaran sanitasi dan lingkungan. Kegiatan meliputi:

- **Kolaborasi dengan Puskesmas** untuk meningkatkan cakupan layanan dan pemeriksaan kesehatan rutin.

- **Kampanye kebersihan lingkungan dan kesadaran sanitasi**, guna menjaga derajat kesehatan masyarakat sekitar tambang.
- **Penguatan pendidikan formal**, termasuk pelatihan vokasional yang mendukung sektor lokal seperti pertanian dan pariwisata.

Dengan mengombinasikan intervensi kesehatan dan pendidikan, Sleman menargetkan kualitas hidup masyarakat tambang yang lebih baik dan berdaya saing.

II.3.1.3 Peningkatan IPM Kabupaten Gunungkidul

Peningkatan IPM di Kabupaten Gunungkidul difokuskan pada **penguatan layanan kesehatan dasar dan promosi kesehatan lingkungan** bagi masyarakat desa tambang. Kegiatan dilakukan melalui:

- **Pelayanan kesehatan berbasis komunitas** untuk ibu dan balita.
- **Penyuluhan gizi** serta pemantauan kesehatan keluarga.
- **Pencegahan penyakit** yang umum terjadi akibat aktivitas di area tambang.
- **Dukungan pendidikan dasar dan pelatihan vokasional**, serta pendidikan berbasis desa tambang.

Program-program ini memperkuat ketahanan kesehatan sekaligus membuka akses keterampilan kerja bagi warga.

II.3.1.4 Peningkatan IPM Kabupaten Bantul

Peningkatan IPM di Kabupaten Bantul difokuskan pada **kelompok rentan seperti ibu dan anak**, serta pemenuhan sarana dasar. Intervensi dilakukan melalui:

- **Penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan berkala**, dilakukan melalui sinergi dengan dinas kesehatan.
- **Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi** bagi masyarakat sekitar tambang.
- **Program promotif dan preventif**, untuk membentuk budaya hidup sehat dan bersih.
- Di bidang pendidikan, kegiatan PPM mencakup **pelatihan keterampilan produktif** (seperti menjahit dan olahan hasil tani) serta **beasiswa lokal** untuk masyarakat desa tambang.

Kabupaten Bantul menitikberatkan program pada penguatan fondasi kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak utama peningkatan IPM.

II.3.2 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang

Pendekatan ekonomi dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah pertambangan di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta diarahkan pada:

- **Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas sektor unggulan** masyarakat sekitar tambang, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil;
- **Pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal** pada sektor pertambangan dan sektor turunannya;
- **Pendampingan bisnis dan akses pasar** bagi pelaku UMKM sekitar tambang;
- **Diversifikasi ekonomi wilayah pascatambang** untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan.

Seluruh pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan struktur dan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kabupaten, serta memperhatikan potensi lokal dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lingkaran tambang.

Berdasarkan data lokasi tambang yang telah memiliki Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RPPM) yang disetujui, distribusi lokasi tambang di DIY mencakup Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Kota Yogyakarta tidak memiliki lokasi tambang aktif, namun tetap memiliki peran dalam hilirisasi dan pengembangan ekonomi penunjang sektor pertambangan.

II.3.2.1 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kulon Progo

Potensi tambang di Kabupaten Kulon Progo tersebar di Kecamatan Kokap, Galur, Lendah, Sentolo, Kalibawang, Temon, Pengasih, dan Nanggulan. Masyarakat sekitar tambang banyak bergantung pada sektor **pertanian, peternakan, dan perikanan**, namun masih menghadapi risiko **bencana gempa dan longsor** serta keterbatasan akses UMKM ke pasar.

Program PPM diarahkan pada:

- **Pelatihan pembuatan batako, cone block, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan;**
- **Penguatan kelompok tani dan ternak**, serta koperasi desa;
- **Pendampingan UMKM** melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pemasaran;
- **Diversifikasi pangan dan penguatan produksi pangan keluarga**, terutama untuk gizi balita;

- **Bantuan sosial ekonomi dasar dan infrastruktur produksi.**

Upaya ini bertujuan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat tambang melalui pengembangan pertanian terpadu, pemberdayaan kelembagaan lokal, dan peningkatan produktivitas UMKM secara berkelanjutan.

II.3.2.2 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sleman

Potensi tambang di Kabupaten Sleman tersebar di Kecamatan Cangkringan, Tempel, dan Turi. Masyarakat sekitar tambang mengandalkan sektor **pertanian hortikultura, peternakan, dan pariwisata alam**. Wilayah ini juga rawan **erupsi Merapi dan gempa**.

Program PPM diarahkan untuk:

- **Pelatihan pertanian modern dan peternakan terpadu**, khususnya berbasis hortikultura;
- **Pengembangan wisata edukatif berbasis komunitas** di sekitar kawasan tambang;
- **Penguatan UMKM lokal melalui pelatihan batako dan cone block**, serta akses pembiayaan mikro;
- **Magang kerja pada sektor pariwisata dan jasa pendukung tambang**;
- **Penyuluhan gizi keluarga dan penguatan produksi pangan lokal**, menjaga ketahanan pangan dan stunting tetap rendah;
- **Bantuan sosial dasar dan pendampingan pelaku usaha kecil.**

Strategi pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis komunitas dan memperluas peluang usaha lokal melalui UMKM yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.

II.3.2.3 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul

Potensi tambang di Kabupaten Gunungkidul tersebar di Kecamatan Ponjong dan Tepus. Daerah ini masih menghadapi tantangan **kemiskinan struktural, rawan bencana (kekeringan, gempa, longsor)**, serta ketergantungan pada **pertanian tradisional**.

Program PPM diarahkan untuk:

- **Pelatihan pertanian lahan kering dan peternakan unggas produktif**;
- **Pengembangan pariwisata berbasis komunitas**, seperti homestay dan wisata alam karst;

- **Diversifikasi ekonomi melalui keterampilan menjahit dan pengolahan hasil tani;**
- **Pemberdayaan kelompok wanita dan pemuda desa dalam UMKM;**
- **Program pelatihan dan magang kerja** di sektor pariwisata dan wirausaha lokal;
- **Penyuluhan gizi dan ketahanan pangan keluarga** melalui diversifikasi tanaman tahan kering;
- **Rehabilitasi sosial dan bantuan sosial dasar** bagi masyarakat rentan tambang.

Strategi PPM difokuskan pada transformasi ekonomi lokal yang tidak hanya menciptakan pendapatan baru, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial melalui pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan berbasis desa.

II.3.2.4 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bantul

Potensi tambang di Kabupaten Bantul tersebar di Kecamatan Srandakan, Pajangan, Pleret, Sedayu, dan Kretek. Ekonomi masyarakat sekitar tambang berbasis pada **agrikultur dan UMKM kerajinan atau makanan**, namun tingkat kemiskinan relatif masih tinggi, dan rawan **banjir dan gempa**.

Program PPM diarahkan untuk:

- **Pelatihan produksi makanan olahan dan kerajinan khas** seperti batik dan kayu;
- **Penguatan UMKM melalui pelatihan menjahit, pembinaan usaha, dan akses permodalan;**
- **Pelatihan manajemen keuangan dan digitalisasi UMKM;**
- **Edukasi gizi seimbang dan pertanian berkelanjutan** untuk ketahanan pangan keluarga;
- **Bantuan kebutuhan dasar dan edukasi mitigasi bencana;**
- **Peningkatan keterampilan kerja masyarakat lingkaran tambang** melalui pelatihan teknis.

Pendekatan PPM di Bantul menitikberatkan pada penguatan ekonomi rumah tangga dan UMKM, pengembangan keterampilan produktif, serta pemanfaatan potensi lokal dalam kerajinan untuk menciptakan ekonomi masyarakat tambang yang mandiri dan berkelanjutan.

II.3.3 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang

Aktivitas pertambangan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk dinamika sosial, budaya, dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RPPM), pemilik tambang diwajibkan menyusun program yang menjaga dan mendukung keberlangsungan nilai-nilai sosial, pelestarian budaya lokal, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pengembangan sosial budaya dalam konteks ini diarahkan untuk menjaga harmoni masyarakat dengan mengacu pada prinsip pelestarian kearifan lokal dan penguatan kohesi sosial. Program prioritas meliputi:

- Revitalisasi kegiatan seni, budaya, dan tradisi masyarakat sekitar tambang,
- Penguatan kapasitas lembaga keagamaan dan sosial,
- Dukungan kegiatan olahraga dan kepemudaan, serta
- Kampanye sadar lingkungan dan konservasi berbasis komunitas.

Pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama, dengan penyesuaian program PPM terhadap kebijakan pelestarian kawasan lindung dan mitigasi dampak lingkungan dari pertambangan.

II.3.3.1 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kabupaten Kulon Progo

Salahsatu kegiatan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo berada dekat dengan kawasan Pegunungan Menoreh, yang kaya akan nilai budaya dan lingkungan. Program PPM difokuskan pada:

- **Pelestarian kesenian tradisional** sebagai wujud perlindungan identitas budaya;
- **Konservasi kawasan Pegunungan Menoreh** sebagai warisan alam;
- **Peningkatan partisipasi pemuda** dalam kegiatan sosial dan budaya melalui pengembangan kelembagaan komunitas;
- **Kampanye lingkungan berbasis komunitas** di sekitar wilayah tambang.

Pendekatan ini memperkuat identitas budaya lokal dan mendukung pelestarian lingkungan alami yang menjadi bagian dari ekosistem hidup masyarakat tambang.

II.3.3.2 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kabupaten Sleman

Salahsatu kegiatan pertambangan di Sleman berada di sekitar lereng **Gunung Merapi**, yang memiliki nilai budaya dan geologis tinggi. Program PPM diarahkan untuk:

- **Pengembangan seni dan tradisi lokal masyarakat Merapi** melalui pelatihan dan revitalisasi budaya;
- **Konservasi kawasan Merapi sebagai warisan geologi**, termasuk edukasi bencana berbasis komunitas;
- **Penguatan kohesi sosial** melalui kegiatan lintas kelompok sosial dan keagamaan;
- **Peningkatan kesadaran lingkungan** melalui aksi penghijauan dan kampanye kebersihan lingkungan tambang.

Program ini mendukung keharmonisan antara masyarakat dan alam Merapi, serta menguatkan daya lenting sosial terhadap risiko bencana.

II.3.3.3 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kabupaten Gunungkidul

Wilayah Gunungkidul dikenal dengan kawasan **Geopark Gunung Sewu** dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi **nilai budaya Jawa**. Program PPM difokuskan pada:

- **Pelestarian budaya lokal masyarakat karst**, termasuk seni tradisional dan kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya;
- **Konservasi kawasan karst** sebagai bagian dari geopark;
- **Kampanye sadar lingkungan** berbasis komunitas dalam menjaga ekosistem karst;
- **Pemberdayaan komunitas seni dan budaya** sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.

Intervensi sosial budaya diarahkan untuk menjaga warisan budaya dan alam karst agar menjadi modal pembangunan wisata dan edukasi jangka panjang.

II.3.3.4 Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan Kabupaten Bantul

Tambang di Kabupaten Bantul banyak berada di kawasan sungai dan dataran rendah yang rentan terhadap banjir. Pendekatan sosial budaya PPM difokuskan pada:

- **Revitalisasi kegiatan budaya sungai**, seperti upacara tradisional dan edukasi masyarakat;
- **Pendidikan masyarakat untuk pelestarian sungai dan pemanfaatannya secara berkelanjutan**;
- **Penguatan komunitas berbasis budaya lokal**, termasuk kesenian dan kerajinan;

- **Kegiatan kepemudaan dan olahraga** sebagai media penguatan kohesi sosial dan regenerasi nilai budaya.

Bantul mengintegrasikan pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan sungai sebagai dasar membangun identitas komunitas yang tangguh terhadap dinamika pembangunan.

II.3.4 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat

Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Kelembagaan ini meliputi kelompok-kelompok sosial seperti Karang Taruna, PKK, lembaga desa, kelompok tani, hingga komunitas tematik lainnya yang secara aktif mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang PPM, penguatan kelembagaan diarahkan pada pembentukan dan pembinaan organisasi masyarakat seperti pokmas, koperasi, dan BUMDes. Selain itu, peningkatan kapasitas tata kelola organisasi serta kepemimpinan lokal juga menjadi prioritas agar kelembagaan mampu menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Untuk menunjang hal tersebut, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pembiayaan turut diberikan oleh pemilik tambang melalui skema PPM yang telah diatur dalam RPPM masing-masing. Upaya ini ditujukan tidak hanya untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif selama masa operasional tambang, tetapi juga memastikan keberlangsungan manfaat sosial ekonomi masyarakat di masa pascatambang.

Implementasi pendekatan ini telah dilakukan di masing-masing kabupaten, dengan pola dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta potensi kelembagaan masyarakat di lingkaran tambang. Uraian per kabupaten disampaikan sebagai berikut:

II.3.4.1 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Kabupaten Kulon Progo

Penguatan kelembagaan masyarakat di Kulon Progo difokuskan pada pengembangan **koperasi desa, organisasi pemuda (Karang Taruna), dan PKK** dalam mendukung ekonomi masyarakat lingkaran tambang. Selain itu, **pengembangan kelembagaan Pokdarwis** juga dilakukan di wilayah dengan potensi wisata berbasis tambang dan agro. Melalui pelatihan manajemen usaha, fasilitasi kegiatan produktif,

dan dukungan sarana, kapasitas kelembagaan desa diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

II.3.4.2 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Kabupaten Sleman

Di Sleman, PPM mendukung penguatan **organisasi desa dalam pengelolaan dana PPM**, serta pembentukan **kelompok usaha bersama (KUB)** dalam pengelolaan hasil tambang berbasis lokal. Selain itu, **penguatan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes dan kelompok tani** juga menjadi prioritas. Program ini mendorong masyarakat memiliki kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi berbasis desa dengan transparan dan akuntabel.

II.3.4.3 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Kabupaten Gunungkidul

Pengembangan kelembagaan komunitas di Gunungkidul difokuskan pada pembentukan dan peningkatan kapasitas **kelompok tani dan ternak berbasis dusun**, serta usaha agrobisnis masyarakat sebagai bagian dari penguatan **BUMDes**. Selain itu, **kelembagaan usaha bersama masyarakat peternak sapi dan petani** mendapatkan dukungan pelatihan dan fasilitasi modal untuk pengembangan produksi dan pasar. Ini mencerminkan pentingnya peran kelembagaan dalam mengelola ketahanan ekonomi pascatambang.

II.3.4.4 Pengembangan Kelembagaan Komunitas Kabupaten Bantul

Di Bantul, PPM diarahkan untuk **membina kelembagaan perempuan dan pemuda desa**, termasuk kelompok **PKK, Karang Taruna, dan kelompok kesenian warga tambang**. Kegiatan pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, serta pendampingan dalam ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari pemberdayaan kelembagaan ini. Tujuannya adalah membentuk komunitas yang tangguh, kreatif, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi sekaligus pelestarian budaya lokal.

II.3.5 Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Kemandirian PPM

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan dampak ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RPPM), sejumlah pemilik tambang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur di wilayah lingkaran tambang.

Jenis infrastruktur yang dimaksud dalam konteks ini mencakup dua sektor utama:

- **Infrastruktur Sosial dan Ekonomi:** perbaikan dan pembangunan jalan, fasilitas UMKM, jembatan, serta pusat pelatihan keterampilan.
- **Air Bersih dan Sanitasi:** penyediaan akses air bersih, pembangunan sistem sanitasi terpadu, dan peningkatan layanan infrastruktur eksisting.

Fokus pembangunan infrastruktur ini berbeda-beda di setiap kabupaten, bergantung pada potensi lokal dan kebutuhan prioritas masyarakat sekitar tambang. Berikut uraian kontribusi infrastruktur kegiatan PPM di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

II.3.5.1 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kulon Progo

Pembangunan infrastruktur PPM di Kabupaten Kulon Progo diarahkan pada **perbaikan jalan dan penguatan internet desa**, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan **UMKM**. Selain itu, **penyediaan air bersih dan pembangunan fasilitas sanitasi dasar** menjadi prioritas, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan akses selama musim kemarau. Ketersediaan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat tambang.

II.3.5.2 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman memiliki infrastruktur air bersih dan sanitasi yang relatif baik. Oleh karena itu, PPM diarahkan untuk **menjaga serta meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang sudah ada**, sekaligus mendukung **pembangunan jalan dan jembatan** untuk kelancaran mobilitas masyarakat tambang. Selain itu, infrastruktur ekonomi seperti **fasilitas pendukung UMKM dan sektor pariwisata** juga diperkuat, sejalan dengan potensi wilayah sebagai tujuan agro-ekowisata.

II.3.5.3 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul

Di Kabupaten Gunungkidul, **akses air bersih sulit terutama saat kemarau**, dan kondisi sanitasi belum optimal. Oleh karena itu, pemilik tambang melalui PPM mendukung **penyediaan air bersih dan sistem sanitasi terpadu**, sekaligus memperbaiki **infrastruktur jalan** dan pengembangan fasilitas **penunjang UMKM**. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses dasar masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kerentanan terhadap bencana lingkungan.

II.3.5.4 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul fokus pada **perbaikan jalan** demi kelancaran aktivitas sosial-ekonomi masyarakat tambang. Meskipun akses air bersih dan sanitasi relatif sudah baik, PPM tetap diarahkan untuk **menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur eksisting** agar berkelanjutan. Selain itu, pembangunan **fasilitas usaha rumah tangga dan pelatihan keterampilan produktif** turut diperkuat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui wirausaha berbasis komunitas.

II.4. PENGAWASAN PPM

Pengawasan pelaksanaan PPM adalah kegiatan untuk memastikan program PPM berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yang mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk menjaga kualitas dan efektivitas program.

Pengawasan internal dilakukan oleh pihak perusahaan tambang sendiri terhadap keberlanjutan PPM yang dilakukannya, serta oleh masyarakat sekitar terhadap PPM yang diterimanya. Pengawasan eksternal dilakukan juga oleh Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM (Balai PPESDM) dari Dinas PUPESDM DIY secara berkala dan dilaporkan dalam laporan tertulis mengenai program-program PPM yang sudah dilakukan.

Untuk pengawasan yang lebih baik, perlu adanya keharusan untuk memberikan laporan per 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. Laporan ini mencakup detail mengenai pelaksanaan PPM, dampak yang dihasilkan, serta perbaikan atau penyesuaian yang telah dilakukan berdasarkan temuan selama tahun tersebut. Selain itu, evaluasi tahunan juga dilakukan terhadap perkembangan masyarakat yang diakibatkan oleh pelaksanaan PPM, guna memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat positif serta keberlanjutan pada masyarakat sekitar

Tabel 2.30 Blue Print program pengembangan masyarakat dengan penerapan aspek SDGs dan keberlanjutan untuk sektor tambang di DIY

No	Pilar PPM	Target SDGs	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul
1	Peningkatan IPM (Kesehatan & Pendidikan)	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	• Pelayanan kesehatan dasar dan sanitasi • Kolaborasi Puskesmas • Pelatihan pariwisata dan bahasa asing	• Penyuluhan ibu-anak • Cek kesehatan berkala • Fasilitas air bersih & sanitasi • Pelatihan menjahit, olahan hasil tani	• Cek kesehatan gratis • Penyuluhan HIV/TBC • Kerja sama posyandu • Bantuan alat & poskesdes • Penguatan sekolah desa tambang	• Pelayanan berbasis komunitas • Penyuluhan gizi & penyakit kulit • Pelatihan vokasi dasar • Penguatan program pelatihan & beasiswa untuk SMK & pemuda
2	Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Tanpa Kemiskinan	• Edukasi bencana • Rehabilitasi sosial untuk masyarakat terdampak tambang	• Edukasi mitigasi • Bantuan alat dan pemasaran usaha rumah tangga • Rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	• Diversifikasi ekonomi berbasis lokal • Pendampingan UMKM & alat produksi • Rehabilitasi sosial pascatambang	• Rehabilitasi sosial • Bantuan dasar bagi kelompok rentan • UMKM berbasis pemuda & perempuan
		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• Agro-ekowisata, hortikultura, peternakan terpadu • Pelatihan batako, cone block, UMKM • Pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi • Sinergi tambang–pariwisata–pertanian	• Pelatihan keterampilan menjahit dan makanan olahan • Dukungan modal dan pembinaan UMKM • Pelatihan usaha rumah tangga berbasis lokal	• Pelatihan batako, ikan, dan olahan pertanian • Penguatan usaha pascatambang melalui pelatihan agribisnis • Pertanian terpadu dan pertambangan terpadu berbasis masyarakat	• Pelatihan pertanian lahan kering dan unggas • Pelatihan pariwisata komunitas • Penguatan UMKM lokal dan pelatihan agribisnis serta perbengkelan untuk peningkatan kapasitas ekonomi desa
		Tanpa Kelaparan	• Penguatan ketahanan pangan lokal melalui hortikultura dan ternak • Mendorong diversifikasi pangan berbasis komunitas	• Peningkatan keterampilan olahan hasil tani • Mendorong usaha	• Pemberdayaan sektor perikanan (ikan lele, dll) • Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan loka	• Penguatan pertanian lahan kering • Pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk

				makanan lokal berbasis komunitas		meningkatkan gizi dan ketahanan pangan
3	Pembangunan Sosial Budaya & Lingkungan	Kota & Permukiman Berkelanjutan	• Seni-tradisi Merapi • Konservasi warisan geologi • Kohesi sosial • Program lingkungan yang terstruktur, konservasi kawasan wisata	• Revitalisasi budaya sungai • Edukasi lingkungan masyarakat • Program budaya & penguatan kelembagaan lingkungan	• Kesenian tradisional • Konservasi Pegunungan Menoreh • Keterlibatan pemuda • Program budaya dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat	• Budaya karst dan Geopark Gunung Sewu • Komunitas sadar lingkungan • Dukungan program lingkungan & infrastruktur air bersih
4	Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat	Kemitraan untuk Tujuan	• Penguatan organisasi desa & dana PPM • BUMDes dan kelompok tani • Kelompok usaha pengelola hasil tambang • Pendampingan kelembagaan & peningkatan kapasitas wirausaha • Tambahan fasilitas ekonomi: kios, gudang produksi, balai pelatihan	• Pembinaan perempuan & pemuda • Kelompok kesenian dan PKK • Pelatihan manajemen usaha komunitas & penguatan kelembagaan perempuan	• Koperasi desa, manajemen usaha PKK & Karang Taruna • Pokdarwis berbasis wisata tambang • Pelatihan tata kelola kelembagaan, penguatan peran Pokmas dan BUMDes	• Kelompok tani & ternak per dusun • Agrobisnis desa berbasis BUMDes • Roadmap penguatan kelembagaan pascatambang
5	Infrastruktur Penunjang PPM	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	• Jalan & jembatan	• Perbaikan jalan • Pengembangan fasilitas usaha rumah tangga & pemasaran digital	• Jalan, internet desa, infrastruktur UMKM • Infrastruktur sekolah, posyandu, air bersih	• Jalan & internet rusak
		Air Bersih dan Sanitasi	• Kualitas air dan sanitasi dijaga	• Sanitasi & air bersih dijaga	• Air bersih & sanitasi dibangun	• Air bersih sulit • Tambahan sanitasi, air bersih, fasilitas pertanian

BAB III

KESIMPULAN

III.1. KESIMPULAN

Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sekitar tambang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk upaya strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara kegiatan pertambangan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dokumen ini berperan sebagai acuan arah kebijakan dan implementasi program PPM oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang.

Beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil dari penyusunan dokumen ini adalah:

1. PPM sebagai Pilar Pembangunan Daerah

PPM bukan sekadar kewajiban administratif pemegang IUP, tetapi merupakan strategi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyatu dengan arah pembangunan daerah (RPJMD dan RTRW). Hal ini memperkuat prinsip bahwa sektor pertambangan harus memberikan dampak positif langsung dan tidak langsung kepada masyarakat di sekitarnya.

2. PPM Harus Terintegrasi dengan Indikator IPM

Program PPM yang disusun harus selaras dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

3. Kondisi Eksisting Perlu Diperhatikan

Setiap kabupaten/kota di DIY memiliki kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta kelembagaan komunitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan program PPM harus berbasis data lokal dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian kebutuhan dan program.

4. Kelembagaan dan Infrastruktur Sebagai Enabler

Penguatan kelembagaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang merupakan faktor kunci dalam mendukung kemandirian masyarakat sekitar tambang. Tanpa penguatan kelembagaan dan dukungan infrastruktur dasar, program PPM akan sulit mencapai keberlanjutan.

5. Perlu Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Keberhasilan pelaksanaan Blue Print PPM akan sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi, musyawarah, dan koordinasi lintas sektor perlu terus digalakkan agar program dapat diterima dan dimiliki oleh masyarakat secara luas.

6. Perlunya Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Blue Print ini perlu ditinjau secara berkala, sekurang-kurangnya setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan perkembangan sosial ekonomi daerah, teknologi, dan perubahan lingkungan strategis lainnya.

Dengan adanya Blue Print ini, diharapkan pelaksanaan program PPM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih terarah, terukur, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. Komitmen seluruh pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan untuk menjadikan PPM sebagai instrumen transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrikulasi Fokus PPM yang Disesuaikan dengan Kondisi Per-Kabupaten

Tabel 3. 1 Matrikulasi Fokus PPM yang Disesuaikan dengan Kondisi Per-Kabupaten

No	Cetak Biru PPM DIY	Target SDGs	Deskripsi Program Per-Kabupaten			
			Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	PPM diarahkan pada penyuluhan dan pengecekan kesehatan	PPM diarahkan pada penyuluhan dan pengecekan kesehatan	PPM diarahkan pada pendukung kelengkapan faskes dan penyuluhan dan pengecekan kesehatan	PPM diarahkan pada pendukung kelengkapan faskes dan penyuluhan dan pengecekan kesehatan
2	Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Tanpa Kemiskinan	PPM diarahkan untuk penanggulangan bencana dan mendukung pengembangan UMKM dan bimbingan kepada masyarakat	PPM diarahkan untuk penanggulangan bencana dan mendukung pembentukan dan pengembangan UMKM	PPM diarahkan untuk penanggulangan bencana dan mendukung pembentukan dan pengembangan UMKM	PPM diarahkan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan UMKM serta pelatihan masyarakat
		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PPM diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi serta dukungan terhadap finansial UMKM	PPM diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi serta dukungan terhadap finansial UMKM	PPM diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi serta dukungan terhadap finansial UMKM dan pengembangan SDM	PPM diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi serta dukungan terhadap finansial UMKM dan pengembangan SDM
3	Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Kemandirian PPM	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	PPM diarahkan untuk dapat membantu perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas.	PPM diarahkan untuk dapat membantu perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas	PPM diarahkan untuk dapat mendukung perbaikan infrastruktur peningkat aksesibilitas, infrastruktur internet, dan infrastruktur UMKM	PPM diarahkan untuk dapat mendukung perbaikan infrastruktur peningkat aksesibilitas, infrastruktur internet, dan infrastruktur UMKM
		Air Bersih dan Sanitasi Layak	PPM diarahkan untuk dapat menjaga dan meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi	PPM diarahkan untuk dapat menjaga dan meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi	PPM diarahkan untuk dapat membantu penyediaan air pada daerah sulit air, serta penyediaan sanitasi layak	PPM diarahkan untuk dapat membantu penyediaan air pada daerah sulit air, serta penyediaan sanitasi layak

Lampiran 2.

Matriks PPM Hasil Tinjauan Lapangan

Tabel 3. 2 Matriks PPM hasil tinjauan lapangan terhadap pelaku usaha tambang di Provinsi DIY

No	Subjek Wawancara	Sustainable Development Goals						
		Memberantas Kemiskinan	Kesehatan dan Kesejahteraan	Pendidikan Bermutu	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur	Tidak ada
1	PT Sugih Alamnugroho	Bedah rumah warga kurang mampu	Ikut membantu dana dalam acara-acara Puskesmas	Memberikan kesempatan siswa SMK sekitar magang			Pembangunan Jalan desa	Dana yang diberikan kepada Desa dan Bappeda
		Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang		Memberikan mahasiswa kampus untuk Kerja praktik			Perkerasan jalan SMK	
							Pembangunan mushola dan masjid desa	
2	CV Handika Karya		Pengobatan gratis, sunatan massal	Beasiswa SMAN 1 Kokap, SMP Muhammadiyah Kokap, SMPN 1 Kokap, SDN 1 Kokap dan Madrasah	Pembangunan bak air	Pengembangan UKM perikanan dan peternakan	Pembangunan balai makam	Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
						Pengembangan tanaman produksi	Pembangunan penerangan	Dana kepada Desa
3	PT Barokah Sumber Rezeqi	Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang	Membantu dana bagi masyarakat masuk rumah sakit	Membantu pembangunan lapangan basket			Pembangunan jalan desa	Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
				Bantuan masyarakat kurang mampu bersekolah			Pembangunan mushola	Dana kepada Desa
							Membantu instalasi listrik	
4	Pak Nurmanto (Penambang pasir bantul)	Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang		Membantu dana bagi anak pekerja kurang mampu				Membantu memberikan dana bantuan pada pihak desa dan LPMD
		Membantu dana bagi pekerja kurang mampu						

 = Program PPM Bersifat Charity (Kegiatan Amal)

 = Program PPM Bersifat Keberlanjutan

Tabel 3. 3 Matriks PPM hasil tinjauan lapangan terhadap pemerintah desa sekitar tambang di Provinsi DIY

No	Subjek Wawancara	Sustainable Development Goals						
		Memberantas Kemiskinan	Kesehatan dan Kesejahteraan	Pendidikan Bermutu	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur	Tidak ada
1	Pemerintah Kalurahan Bedoyo	Bedah rumah warga kurang mampu	Ikut membantu dana dalam acara-acara Puskesmas	Memberikan kesempatan siswa SMK sekitar magang			Pembangunan Jalan desa	Dana yang diberikan kepada Desa dan Bappeda
		Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang	Ikut membantu memberikan bantuan telur untuk pencegahan stunting	Memberikan mahasiswa kampus untuk Kerja praktik			Perkerasan jalan SMK	Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
							Pembangunan mushola dan masjid desa	
2	Pemerintah Kalurahan Hargorejo		Pengobatan gratis, sunatan massal	Beasiswa SMAN 1 Kokap, SMP Muhammadiyah Kokap, SMPN 1 Kokap, SDN 1 Kokap dan Madrasah	Pembangunan bak air	Pengembangan UKM perikanan dan peternakan	Pembangunan balai makam	Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
						Pengembangan tanaman produksi	Pembangunan penerangan	Dana kepada Desa
							Pembangunan jalan	
3	Pemerintah Kalurahan Kepuharjo	Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang	Membantu dana bagi masyarakat masuk rumah sakit	Membantu pembangunan lapangan basket			Pembangunan jalan desa	Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
				Bantuan masyarakat kurang mampu bersekolah			Pembangunan mushola	Dana kepada Desa
							Membantu instalasi listrik	

 = Program PPM Bersifat Charity (Kegiatan Amal)

 = Program PPM Bersifat Keberlanjutan

Tabel 3.1 Matriks PPM hasil tinjauan lapangan terhadap masyarakat sekitar tambang di Provinsi DIY

No	Subjek Wawancara	Sustainable Development Goals						
		Memberantas Kemiskinan	Kesehatan dan Kesejahteraan	Pendidikan Bermutu	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur	Tidak Menyasar SDGs
1	Ibu Penjaga Angkringan pak saman & Ibu penjaga Toko Surodadi (Pasar Bedoyo)	Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang	Dana Bantuan Puskesmas	Kesempatan Magang Kepada Siswa SMK			Pembangunan Jalan desa	Dana yang diberikan kepada Desa dan Bappeda
				Kesempatan Kerja Praktik Untuk Mahasiswa				Kegiatan masyarakat acara kebudayaan dan acara kemerdekaan
2	Mas Iwan (Tokoh masyarakat)	Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Masyarakat Sekitar Tambang	Dana Bantuan Rumah Sakit	Bantuan Pembangunan Lapangan Basket			Pembangunan Jalan Desa	Bantuan Dana Kegiatan Kebudayaan dan Sosial
				Bantuan masyarakat kurang mampu bersekolah			Pembangunan mushola	Dana Bantuan Kepada Desa
							Pembangunan Instalasi Listrik	
							Pembangunan gedung desa	

 = Program PPM Bersifat Charity (Kegiatan Amal)

 = Program PPM Bersifat Keberlanjutan

Lampiran 3. Dokumen Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha, Pemerintah Desa Lingkar Tambang, dan Masyarakat

3.1 Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha

Tabel 3. 4 Wawancara dengan Pelaku Usaha CV Handika Karya

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	CV Handika Karya
Lokasi	Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Kunjungan	Kamis, 6 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng • Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat CV Handika Karya	CV Handika Karya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Aneka Dharma Persada, perusahaan konstruksi yang berkantor pusat di Jl. Retno Dumilah No. 37A Rejowinangun, Kapanewon Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Aneka Dharma Persada memiliki fasilitas pembuatan aspal hotmix, beton pracetak, dan betonreadymix. CV Handika Karya bergerak dalam bidang penambangan batu andesit. Pada tahun 2016, luas IUP Operasi Produksi adalah 63,72 hektar. Berdasarkan estimasi Juni Triyono, dkk pada tahun 2016 menggunakan software Surpac, cadangan andesit yang ada diperkirakan sebesar 4.683,875 m³ atau 12.880.656 ton. Metode penambangan yang diterapkan adalah sidehill quarry type.

Program PPM Berdasarkan Wawancara	Pada kunjungan ke perusahaan, kami berkesempatan bertemu dengan Kepala Teknik Tambang, Bapak Asdie Fitri Nugroho, S.T, M.T, yang menjabat sejak tahun 2016. Berdasarkan wawancara, terdapat dua kategori dana yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan PPM: 1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Penyerahan bibit tanaman (alpukat, sengan, dll). • Kolamisasi ikan lele. • Kompensasi perkerasan jalan. • Dana rutin yang diberikan kepada pihak Kalurahan Hargorejo, Kulon Progo. • Kompensasi bagi rumah warga yang terletak di pinggir jalan yang dilewati kendaraan pembawa andesit. 2. Pengembangan Manusia • Dana untuk sekolah di sekitar (SD-SMP-SMA) sejak 2016 hingga 2023. • Training ternak cacing yang sempat dilakukan namun berhenti saat COVID. • Bantuan untuk universitas dalam bentuk kesempatan magang dan penelitian bagimahasiswa di wilayah perusahaan.

Dokumentasi



Tabel 3. 5 Wawancara dengan Pelaku Usaha PT Barokah Sumber Rezeqi

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	PT Barokah Sumber Rezeqi
Lokasi	Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Kunjungan	Senin, 10 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat PT Barokah Sumber Rezeqi	PT Barokah Sumber Rezeqi adalah perusahaan penambangan pasir dan batu dengan luas wilayah penambangan sebesar 4,31 hektar. Jangka waktu WIUP/WIUPK perusahaan ini adalah dari tahun 2020 hingga 2025. Kepala teknik tambang perusahaan ini adalah Pak Asto.
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Membantu pembangunan jalan desa. • Membantu pembangunan mushola desa. • Membantu pembangunan gedung rumah pelayanan di Kalurahan Kepuharjo. • Membantu instalasi listrik di daerah dekat tambang Kalurahan Kepuharjo dan sekitarnya. • Membantu pembangunan lapangan basket di SMPN 2 Cangkringan. • Memberikan dana untuk kegiatan wayang di Kalurahan Kepuharjo.

	• Memberikan dana bagi warga yang kesulitan ekonomi, seperti untuk mengambilijazah atau masuk rumah sakit. • Dana rutin yang diberikan kepada pihak Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Umbulharjo. 2. Pengembangan Manusia • Belum ada program yang dilakukan.
Dokumentasi Lapangan	



Tabel 3. 6 Wawancara dengan Pelaku Usaha PT Sugih Alamnugroho

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	PT Sugih Alamnugroho
Lokasi	Jl. Wonosari Pracimantoro No.20, Ngala Sombo, Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892
Hari Kunjungan	Selasa, 4 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng • Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat PT Sugih Alamnugroho	PT Sugih Alamnugroho adalah perusahaan penambangan batugamping di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beroperasi di Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan SK Gubernur tahun 1991 NO.50/12/KPTS/1991 tertanggal 6 Juli 1991 yang kemudian diperpanjang dengan IUP No. 25A/KPTS/IUP/110311108 tertanggal 8 November 2003, PT Sugih Alamnugroho memiliki IUP dengan luas wilayah 25 hektar. Penambangan dilakukan di Gunung Sidowayah. Estimasicadangan di Gunung Dengkeng yang tertuang dalam paper ilmiah karya Muhammad Multazam dari UPN Veteran Yogyakarta menunjukkan cadangan terukur menggunakan Metode Cross Section sebesar 9.429,255 ton dengan target produksi 282.240 ton/tahun, maka umur tambang diperkirakan 30 tahun.

Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Dana rutin yang diberikan kepada pihak desa. • Memenuhi permintaan kodim untuk menyalurkan air dari Kalurahan Panggang(BBM). • Perkerasan jalan di depan SMK sekitar. • Dana rutin yang diberikan kepada pihak Bappeda/Baperlitbangda daerah GunungKidul. • Program bedah rumah untuk warga sekitar perusahaan. 2. Pengembangan Manusia • Dana untuk sekolah sekitar dalam melaksanakan event-event. • Hampir 90% pekerja di perusahaan merupakan warga asli Ponjong, dengan aturan setiap dukuh memiliki sekitar 10 pekerja. • Program magang dan pelatihan di perusahaan untuk sekolah sekitar. • Membantu universitas dengan memberikan kesempatan magang dan penelitian di wilayah perusahaan.
--	---

Dokumentasi Lapangan



3.2 Hasil Wawancara dengan Perwakilan Penambang di Kali Progo Bagian Srandakan, Bantul: Pak Nurmanto

Tabel 3. 7 Wawancara dengan Perwakilan Penambang

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Pak Nurmanto
Lokasi	Dusun Sambeng, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Kunjungan	Kamis, 6 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng • Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat Dusun Sambeng dan Pak Nurmanto	Dusun Sambeng adalah salah satu dusun di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan yang terletak dekat dengan Sungai Progo. Menurut skripsi Via Deviana berjudul “Dinamika Konflik Tambang Pasir di Kalurahan Poncosari Tahun 2011-2015”, pertambangan pasir sungai di Kalurahan Poncosari mulai dikomersialisasikan sejak tahun 1997 di delapan dusun: Dusun Talkondo, Singgelo, Sambeng I, Sambeng II, Sambeng III, Bibis, Babakan, dan Ngentak. Pada periode 1999 hingga 2002, penambangan di Dusun Talkondo, Singgelo, Sambeng II, dan Sambeng III dihentikan karena stok pasir habis, namun pada tahun 2002, keempat dusun tersebut kembali aktif menambang. Setelah erupsi Merapi tahun

	2010, penambangan pasir Sungai Progo di Kalurahan Poncosari dilakukan lebih masif dengan hadirnya penambang modern yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Kehadiran penambang mesin sedot di Kalurahan Poncosari tidak lepas dari kebijakan pemerintah pascaerupsi Gunung Merapi tahun 2010, di mana Badan Balai Besar Sungai dan Pemerintah DIY mengeluarkan kebijakan normalisasi sungai-sungai di DIY yang berhulu di Merapi untuk mitigasi bencana. Kebijakan ini, yang minim pengawasan, justru memberi celah bagi perusahaan tambang dan kelompok penambang bermodal besar untuk menambang pasir Progo secara liar. Pak Nurmanto adalah salah satu warga Dusun Sambeng yang memiliki izin penambangan rakyat hingga saat ini. Izin ini terus diperbarui oleh Pak Nurmanto dankelompoknya untuk memastikan proses penambangan yang sah dan legal.
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	2. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Bantuan dana untuk pihak padukuhan dan kalurahan. • Bantuan dana untuk pihak LPMD padukuhan.

	• Bantuan kepada warga Sambeng yang mengalami kesulitan ekonomi (janda dan anakyatim). 3. Pengembangan Manusia • Belum ada program yang dilakukan.
Dokumentasi Lapangan	

3.3 Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Lingkar Tambang

Tabel 3. 8 Hasil Wawancara dengan Perangkat Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Kepala Kalurahan Sulardi, S.Pd, M.Pd
Lokasi	Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892
Hari Kunjungan	Selasa, 11 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Irvan Fatarwin Lubis S.T • Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng
Profil Singkat Kalurahan Bedoyo	Bedoyo adalah salah satu dari 11 kalurahan di Kapanewon Ponjong yang mayoritas terdiri dari daerah perbukitan batu gamping yang biasa disebut daerah conical hill. KalurahanBedoyo membagi kegiatan masyarakat menjadi beberapa bidang: • Bekerja di bidang pertanian • Bekerja di bidang pertambangan batugamping • Bekerja di tempat lain baik di sektor jasa maupun barang
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Membantu pembangunan jalan desa. • Membantu pembangunan mushola desa dan masjid. • Membantu pembangunan rumah warga kurang mampu di sekitar Kalurahan Bedoyo. • Membantu dana kegiatan wayang di Kalurahan Bedoyo.

	• Dana sosial yang diberikan langsung dari perusahaan ke warga. • Dana rutin yang diberikan kepada pihak Kalurahan Kepuharjo. • Dana kesehatan yang diberikan perusahaan kepada desa dalam rangka programstunting (memberikan telur). • Dana kesehatan lain untuk program bayi dan lansia. 2. Pengembangan Manusia • Program beasiswa pendidikan yang diberikan langsung kepada sekolah-sekolah disekitar perusahaan.
Dokumentasi Lapangan	

2. Hasil Wawancara dengan Perangkat Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Carik Siti Nura'eni
Lokasi	Jalan Temon-Kokap, Krian, Hargorejo, Kec. Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55654
Hari Kunjungan	Kamis, 6 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng • Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat Kalurahan Hargorejo	Hargorejo adalah salah satu dari lima kalurahan di Kapanewon Kokap yang terdiri daridataran rendah dan dataran sedang, serta berada di daerah Pegunungan Menoreh. Visi Lurah Terpilih untuk Periode Tahun 2022-2027 adalah: “Membangun Kalurahan Hargorejo Dengan Kebersamaan Untuk Melanjutkan Program Dan Percepatan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”. Secara administrasi, daerah tambang beradadi Padukuhan Gunung Rego.
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Pembangunan jalan desa, terutama yang bersinggungan dengan jalan keluar truk tambang. • Pembangunan balai makam desa. • Bantuan dana untuk kegiatan masyarakat (acara keagamaan, acara kemerdekaan). 2. Pengembangan Manusia

	• Dana beasiswa untuk sekolah-sekolah sekitar (SD, SMP, SMA). • Pelatihan pengembangan UKM, termasuk kolam ikan, tanaman produksi (alpukat), dan peternakan (ulat pakan).
--	--

Tabel 3. 9 Hasil Wawancara dengan Perangkat Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Kepala Kalurahan Hari Suprpto
Lokasi	Pager Jurang, Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55583
Hari Kunjungan	Senin, 10 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T
Profil Singkat Kalurahan Kepuharjo	Kepuharjo adalah salah satu dari lima kalurahan di Kapanewon Cangkringan yang mayoritas terdiri dari daerah perbukitan, terletak di lereng selatan Gunung Merapi. Kegiatan masyarakat di Kalurahan Kepuharjo terbagi menjadi beberapa bidang: • Bekerja di bidang pertanian • Bekerja di bidang pertambangan pasir dan batu • Bekerja di bidang wisata • Bekerja di sektor jasa dan barang
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Membantu pembangunan jalan desa. • Membantu pembangunan mushola desa.

	• Membantu pembangunan gedung rumah pelayanan Kalurahan Kepuharjo. • Membantu instalasi listrik masuk ke daerah dekat tambang Kalurahan Kepuharjo dan sekitarnya. • Membantu pembangunan lapangan basket di SMPN 2 Cangkringan. • Membantu dana kegiatan wayang di Kalurahan Kepuharjo. • Dana sosial yang diberikan langsung dari perusahaan ke warga. • Dana rutin yang diberikan kepada pihak Kalurahan Kepuharjo. 2. Pengembangan Manusia • Belum ada program yang berjalan.
Dokumentasi Lapangan	

3.4 Hasil Wawancara dengan Masyarakat Lingkar Tambang

Tabel 3. 10 Hasil Wawancara dengan Ibu Penjaga Angkringan Pak Saman & Ibu Penjaga Toko Surodadi di Pasar Bedoyo

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Pak Saman
Lokasi	Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Gununkidul 1. Ibu Penjaga Angkringan terletak di depan PT. Sugih Alam, di rest area monumentSudirman 2. Ibu Penjaga Toko Surodadi terletak di Pasar Bedoyo
Hari Kunjungan	Selasa, 4 Juni 2024 dan Selasa, 11 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Irvan Fatarwin Lubis S.T • Bagaskara Wahyu Purnomo Putra S.T, M.Eng
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Membantu pembangunan jalan desa. • Perusahaan memberikan dana kepada Desa dan Bappeda 2. Ekonomi • Masyarakat merasa terbantu dengan perusahaan yang memperkerjakan warga sekitar 3. Kesehatan • Ikut membantu dana dalam acara-acara Puskesmas 4. Pendidikan • Memberikan kesempatan siswa SMK sekitar magang • Memberikan mahasiswa untuk Kerja praktik

Tabel 3. 11 Hasil Wawancara dengan Mas Iwan, Tokoh Masyarakat Kapanewon Cangkringan

Nama Badan Usaha/ Kelompok / Perorangan	Mas Iwan
Lokasi	Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman
Hari Kunjungan	Senin, 10 Juni 2024
Tim Kunjungan	• Irvan Fatarwin Lubis S.T • Aldi Hendra Hermawan S.T.
Kegiatan PPM Berdasarkan Wawancara	1. Infrastruktur Sarana dan Prasarana • Pembangunan Jalan • Pembangunan gedung desa • Kegiatan masyarakat • Pembangunan penerangan • Dana kepada desa 2. Ekonomi • Masyarakat merasa terbantu dengan perusahaan yang memperkerjakan warga sekitar 3. Kesehatan • Membantu warga kurang mampu (rumah sakit) 4. Pendidikan • Beasiswa sekolah kepada siswa di sekitar tambang 5. Pengembangan Manusia • Belum ada program yang berjalan.

3.5 Dokumentasi Hasil FGD Masyarakat dan Pengusaha 22 Mei 2025



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Pos-el : dpupesdm.jogjaprovo.go.id Laman : dpupesdm@jogjaprovo.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	: Pembinaan Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Mei 2025
Surat Undangan	: B/500.10.2.3/1898/D8 tanggal 15 Mei 2025
Waktu Sidang/Rapat	: 09.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat A Dinas PUPESDM DIY
Acara	: Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Tambang oleh Pemegang IUP, SIPB dan Perbankan
Ketua	: Michael Yanu Koesumakristi, ST
Sekretaris	: -
Pencatat	: Cundari
Peserta Sidang/Rapat	: 1. Bank Negara Indonesia 2. Bank Rakyat Indonesia 3. Bank Pembangunan Daerah DIY 4. PT. PLN (Persero) 5. PT. Anindya Mitra Internasional 6. CV. Bahtera Usaha Sehati 7. PT. Caldomill Indonesia 8. CV. Giri Kencana 9. PT. Sugih Alamanugroho 10. PT. Surya Mendung Purnama 11. IUP OP David Okta Wijaya 12. PT. Kali Gendol Perkasa 13. Koperasi Jasa Petruk Sejahtera Mandiri 14. PT. Nyonya Tri Asih 15. CV. Handika Karya 16. CV. Muncul Karya 17. PT. Estusae Jaya Abadi 18. CV. Segara Gunung Manunggal 19. CV. Berkah Alam Mandiri 20. Forum TSLP 21. Bidang ESDM DPUPESDM DIY 22. Balai PUPESDM DPUPESDM DIY

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Ibu Yustina Ika Kurniawati, S.T., M.T selaku Kepala Bidang ESDM DPUPESDM DIY menyampaikan tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta Pelaksanaan CSR oleh Perbankan untuk mewujudkan kaidah pertambangan yang baik dan tentu saja agar keberadaan kegiatan pertambangan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

2. Bapak Agus Hendratno, S.T., M.T selaku akademisi dari Fakultas Teknik Geologi UGM menyampaikan tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dapat menunjang aspek SDGs yaitu aspek Sosial, aspek Ekonomi dan aspek Lingkungan, untuk itu diperlukan Cetak Biru PPM agar program PPM dapat diarahkan untuk memenuhi aspek tersebut. Selain itu disampaikan kondisi pelaksanaan PPM saat ini di DIY yang sebagian besar hanya bersifat *Charity*, belum memenuhi aspek keberlanjutan seperti tujuan diterapkannya Program PPM serta harapan pelaksanaan Program PPM agar dapat mencapai aspek SDGs di sekitar lokasi tambang.
3. Beberapa Pemegang IUP menyampaikan program PPM yang telah dilaksanakan sejauh ini seperti PT. Sugih Alamanugroho yang telah membantu program bedah rumah, fasilitas MCK, pemasangan listrik dan pembangunan sumur.
4. CV Muncul Karya yang telah membantu program penerangan jalan dari perusahaan dari padukuhan sampai pusat keramaian tetapi ada beberapa oknum yang persentasenya tidak setuju program penerangan jalan dan mengusulkan agar Bidang ESDM dapat memfasilitasi untuk ke padukuhan yang akan diberikan program PPM penerangan jalan dari perusahaan.
5. PT Anindya Mitra Internasional telah memfasilitasi sambungan listrik di sekitar Kalurahan Bedoyo Kabupaten Gunungkidul.
6. Program PPM adalah rencana dari pemegang IUP dan SIPB yang telah mendapat persetujuan, dan jika merubah kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan maka harus diubah terlebih dahulu persetujuan Program PPM nya.
7. Balai PPESDM dimohon untuk menuntun pemegang IUP dan SIPB agar program PPM nya dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang di setujui.
8. Data terbaru di Kalurahan Bedoyo, masih ada kurang lebih 70 rumah tangga yang masih memperoleh akses listrik dengan cara menyalur.
9. Hasil dari kegiatan Pembinaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang IUP dan SIPB mengetahui bahwa Program PPM menjadi program yang wajib diberikan kepada warga sekitar tambang.
 - b. Pemegang IUP dan SIPB mengetahui bahwa Program PPM dan CSR merupakan hal yang berbeda, Program PPM wajib dilaksanakan oleh pemegang IUP dan SIPB untuk daerah sekitar lokasi tambang.
 - c. Program PPM diharapkan bukan hanya sebagai kegiatan amal (*charity*), tetapi harus berkelanjutan dan dapat mendukung tercapainya aspek SDGs.
 - d. Program PPM tahunan yang tidak tercapai, harus tetap dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - e. Pelaksanaan Program PPM menjadi dasar pemberian persetujuan perpanjangan dan pengakhiran IUP dan SIPB.

Pimpinan Sidang/Rapat
Kepala Seksi Sumber daya Geologi dan Mineral,



M. Yana Koesumakristi, ST

DOKUMENTASI KEGIATAN



DAFTAR HADIR KEGIATAN

DAFTAR HADIR

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan/Atau Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Bagi Masyarakat Sekitar Tambang

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	Tanda Tangan
1	S. S W O S A P u t r o		PT S A A	1.....
2	Timus B		CV BAHTERA USAHA SEJATI	2.....
3	R. Syarif Mahyud		BSTMB DIY	3.....
4	Agus Hembatno		Teknik Geologi UGM	4.....
5	C. sinada S. K.			5.....
6	Endri Fajar miko			6.....
7	syahid		PT. AMI	7.....
8	Wijaya Ambar		CV. Munaul Karya	8.....
9	Aldi Hermawan		T. Geologi UGM	9.....
10	NIHA ABUSTINAH		PT. SURYA M. PURNAMA	10.....
11	Pretty Vega		PT Ny Triasih	11.....
12	Angga DD		PT. PLN UPS YG 2	12.....
13	Ryan P			13.....
14	Ma A.	P	Bapperida CIL	14.....
15	Fina L.	P	Bapperida/Sekretariat FOM	15.....
16	Ari Suro p	L	Bapperida / TSLP	16.....
17	Ragas Sanyaji	L	CV. Segara Gunung M. 1	17.....
18	Vira A. M.		Bank BPD DIY	18.....
19	Prima Elia		CV. Berkah Alam Mandiri	19.....
20	Sier App	L	BPPERONG	20.....
21	Enur N. B	L	Balai PPSDM	21.....
22	Prasetya A. R	L	CV. Biri Kenana	22.....
23	Maghtur Arifin	L	Balai PPSDM	23.....
24	Wahyu Setiawan	L	Balai PPSDM	24.....
25	Satyaningrum AP	P	Bid. ESDM	25.....
26	Henri W.	P	Bid. ESDM	26.....
27	Nandy H	L	Bid. ESDM	27.....
28	Gundari	L	Bid. ESDM	28.....
29	M. Saputra	L	Bid. ESDM	29.....
30	Anir Perbowo	L	Bid. ESDM	30.....

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	Tanda Tangan	
31	Alya Sapthri	P	Bid ESDM	31.....	
32	P. Kade	P	Bid. ESDM		32.....
33	M. Zulkarnain		Bid ESDM	33.....	
34	keol		ESDM		34.....
35	Henry P		Bid. ESDM	35.....	
36	Gulman Yusuf		Bid. ESDM		36.....
37	Harry W		DPUP ESDM	37.....	
38	Riatmario		PT. Kali gendol P		38.....
39	Subopo		Kep. Jara petruk	39.....	
40	Novan		Estu sage jaya		40.....
41	Senja		ESDM	41.....	
42	Sujanwar		DPUP ESDM DM		42.....
43	Asdie Fitri		CN. Handika Karya	43.....	
44	Nur cholis		DPUP ESDM		44.....
45	M. Fargrestu		DPUP ESDM	45.....	

Yogyakarta,

2025

PTTK

 Yustina Ika Kurniawati, ST.MT
 NIP. 19771116 200501 2011

UNDANGAN KEGIATAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Pos-el : dpupesdm.jogjaprovo.go.id Laman : dpupesdm@jogjaprovo.go.id

Nomor : B/500.10.2.3/1898/D8 15 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)

Di Yogyakarta

Kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat A Dinas PUPESDM DIY
Acara : Pelaksanaan Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan/atau *Corporate Social
Responsibility (CSR)* Bagi Masyarakat Sekitar Tambang

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala DPUPESDM,



Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I

Nomor : B/500.10.2.3/1898/D8
Tanggal : 15 Mei 2025

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Pimpinan Bank Negara Indonesia
2. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia
3. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah DIY
4. Manager UP3 Yogyakarta PT. PLN (Persero)
5. Pimpinan/Direktur PT. Anindya Mitra Internasional
6. Pimpinan/Direktur CV. Bahtera Usaha Sejati
7. Pimpinan/Direktur PT. Caldomill Indonesia
8. Pimpinan/Direktur CV. Giri Kencana
9. Pimpinan/Direktur PT. Sugih Alamanugroho
10. Pimpinan/Direktur PT. Surya Mendung Purnama
11. Pimpinan/Direktur IUP OP David Okta Wijaya
12. Pimpinan/Direktur PT. Kali Gendol Perkasa
13. Pimpinan/Direktur Koperasi Jasa Petruk Sejahtera Mandiri
14. Pimpinan/Direktur PT. Nyonya Tri Asih
15. Pimpinan/Direktur CV. Handika Karya
16. Pimpinan/Direktur CV. Muncul Karya
17. Pimpinan/Direktur PT. Estusae Jaya Abadi
18. Pimpinan/Direktur CV. Segara Gunung Manunggal
19. Pimpinan/Direktur CV. Berkah Alam Mandiri
20. Ketua Sekretariat Forum TSLP
21. Kepala Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY
22. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM Dinas PUPESDM DIY

Kepala DPUPESDM,



Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II

Nomor : B/500.10.2.3/1898/D8
Tanggal : 15 Mei 2025

SUSUNAN ACARA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN/ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
BAGI MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG

Kamis, 22 Mei 2025

Jam	Materi	Penyaji
09.00 – 09.30	Registrasi	Panitia
09.30 – 10.30	Materi 1 “Kewajiban Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta Pelaksanaan CSR oleh Perbankan”	Ibu Yustina Ika Kurniawati, S.T., M.T selaku Kepala Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY
10.30 – 11.30	Materi 2 “Cetak Biru Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang DIY”	Bapak Agus Hendratno, S.T., M.T. Selaku Akademisi Departemen Teknik Geologi UGM
11.30 – 12.30	Diskusi	Narasumber dan Peserta
12.30 - selesai	Penutup	Panitia

Kepala DPUPESDM,



Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

ឯកសារនេះមានលក្ខណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Pos-el dpupesdm@jogjaprovo.go.id Laman <http://dpupesdm.jogjaprovo.go.id>

Sidang/Rapat	: Focus Group Discussion Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY
Hari/ Tanggal	: Rabu, 10 Juli 2024
Surat Undangan	: B/500.10.4.3./3121/D8/M
Waktu Sidang/Rapat	: 09.00 s.d. selesai
Tempat	: Ruang A Kantor Dinas PUPESDM Provinsi Yogyakarta
Acara	: FGD Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY
Pimpinan Rapat	: Yustina Ika Kurniawati, S.T., M.T.
Sekretaris	: -
Pencatat	: Cundari
Peserta Sidang/Rapat	: 1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul 4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman 5. Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman 6. Lurah Trimurti, Kapanewon Srandakan, Bantul 7. Lurah Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul 8. Lurah Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul 9. Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Bantul 10. Lurah Argodadi, Kapanewon Sedayu, Bantul 11. Lurah Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo 12. Lurah Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo 13. Lurah Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo 14. Lurah Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo 15. Lurah Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo 16. Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo 17. Lurah Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo 18. Lurah Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo 19. Lurah Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul 20. Lurah Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul

21. Lurah Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul
22. Lurah Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul
23. Lurah Karangasem, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul
24. Kepala Bidang ESDM
25. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM
26. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
27. Staf Pertambangan Mineral Bidang ESDM
28. Pimpinan CV. Cita Prima Konsultan
29. Tenaga Ahli Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY

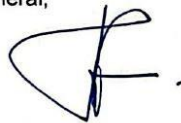
Kegiatan Sidang/Rapat :

- a. Perangkat Kalurahan Gedang Sari menanyakan mengenai PT Bumi Lintang Sejahtera yang melakukan pengambilan batu untuk urugan pada Proyek Nasional Jalan Tol di utara Provinsi Yogyakarta. Apakah perusahaan tersebut sudah diproses oleh pihak Dinas PUPESDM karena menambang di wilayah ilegal. Jawaban : Pada forum ini, topik yang sebaiknya dibahas adalah mengenai dana PPM yang kebanyakan masih berupa kegiatan amal/charity. Untuk perizinan, lebih baik didiskusikan di forum lain. Sedikit menambahkan bahwa untuk penindakan tambang ilegal, Kepolisian menjadi ujung tombaknya, dan Pemprov Yogyakarta melalui Dinas PUPESDM dapat berkoordinasi mengenai lokasi dan wilayah yang menjadi “sengketa”.
- b. Saran dari Perangkat Kalurahan Sampang, Kabupaten Gunung Kidul (Suharman) yaitu agar kegiatan pasca tambang berupa pertanian dan perkebunan di Kalurahan Sampang segera dieksekusi. Pengalaman desa tersebut telah mencoba melakukan kegiatan pembibitan ikan, namun masih menggunakan dana pribadi.
- c. Saran dari Perangkat Kalurahan Serut, Kabupaten Gunung Kidul (Giarto) bahwa warga Kalurahan Serut merasa kegiatan tambang mempengaruhi volume air bersih yang bisa mereka dapatkan. Di saat musim kemarau seperti sekarang ini, pengurangan volume air terasa signifikan. Oleh karena itu, kegiatan pasca tambang berupa pertanian dan perkebunan di Kalurahan Sampang dirasa sulit karena membutuhkan air yang cukup banyak.
- d. Saran dari Perangkat Kalurahan Kepuharjo Warga Kalurahan Kepuharjo merasa bahwa sektor mata pencaharian yang tidak terdampak oleh Covid adalah pertanian dan peternakan (industri susu sapi). Mereka merasa bahwa

perlu adanya program-program PPM yang menyentuh bidang pertanian dan peternakan (industri susu sapi). Sinergi juga diperlukan antara pelaku usaha tambang serta sektor mata pencaharian lain seperti pariwisata yang ada di sekitar Kepuharjo agar perekonomian desa tetap berjalan meskipun tambang sudah tidak ada. Jawaban: Pada blueprint ini, diharapkan program sustainability seperti di Kalurahan Kepuharjo di bidang industri susu dan pariwisata bisa dicanangkan dan dieksekusi sebagai salah satu bentuk pengaplikasian dana PPM di sekitar tambang.

- e. Saran dari Bappeda Pemda Sleman, menyarankan agar rancangan blueprint pada bagian infrastruktur menyertakan jalan desa. Selain itu, bagian reklamasi juga belum disertakan, dan sektor pariwisata sebagai bagian kerjasama belum dimasukkan. Untuk poin mengenai posyandu, mohon untuk dipertimbangkan kembali apakah perlu atau tidak. Jawaban: pada blueprint mengenai jalan, terutama jalan tambang yang kebetulan merupakan jalan desa, memang wajib perusahaan perbaiki dan kembangkan, bukan hanya pada kegiatan PPM ini saja. Untuk reklamasi, tidak dibahas pada blueprint PPM karena sudah ada dan diatur dalam kegiatan lain yang berbeda. Sektor pariwisata dan posyandu akan ditindaklanjuti lebih lanjut.

Pimpinan Rapat/Sidang
Kepala Bidang Energi Sumber Daya
Mineral,



Yustina Ika Kurniawati, S.T., M.T.

DOKUMENTASI KEGIATAN



DAFTAR HADIR KEGIATAN



DAFTAR HADIR

KEGIATAN :

TANGGAL :

LOKASI :

No	Nama	Instansi	No. Kontak	TTD
1	DIAH NUESA FITRI	KAL. TUK SONO	089828325373	
2	Andi Ferdan	Kal. Kepuharjo	08572750096	
3				
4	Anggar Prasetyo	Kal. Bedoyo	081234591242	
5	Haris W	ESDM	081391073833	
6	Gusman Yury	Dm PUPESDM	0852270222	
7	Sauira	Kal. Hargorejo	082324108707	
8	Henry P	DPUP ESDM	081229769171	
9	Coetra S.F.	Kal. Indragiri	085086209028	
10	Eisa F. Pasku	DPUP ESDM DIY	08182704341	
11				
12		Wijimulya	08194932911	
13	Handika Dwi	Rasulan		
14	Bdi Hendra H	konsultan	08222579206	
15	Bambang S	Jahkejo	085899463173	
16	SUMARAH	Calunggo	087738048122	
17	Andy EW	temaga Anah	082300182053	
18	Iwan F. Lubis	konsultan	089675115818	
19	Ningrum	DPUP ESDM DIY	081804786782	
20	Heni W	Dinas PUPESDM	083869253135	
21	Agung Mardani	Pupeda Gunungkidul	081804041589	
22	Sumardi	Kal. Mentawai	085944230282	

No	Nama	Instansi	No. Kontak	TTD
	Embrone N.B	Balai PPSDM		EL
	Pdli.c	BP2 ESDM		F
	Andari	Bidang ESDM		al
	Noor An	Reppada Sln		My
	Tilik Bernu	Reppada Sln		X
	Syaiful B.	TA. Sosial.		Sy.
	Wigiro	Reppada BEL		X
	Nur Hine	Angeddi		X
	Riswan	Tahun Sudi		X
	Suharnon	Sampang		X
	HARIZUMU	WATUGAMAH		2/11
	Rufaganta	revent		X
	Duma-Li	Tihang.		X
	Nandy	ESDM		May
	M. Saputra	ESDM		A.
	Nurkolis	Sekretariat		DA.
	Bro .o	PPS ESDM		Dr

UNDANGAN KEGIATAN

T



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320

Website: dpupesdm.jogjapro.go.id Email : dpupesdm@jogjapro.go.id Kode Pos 55231

Yogyakarta, 04 Juli 2024

Kepada :

Yth.

(Daftar Terlampir)

di –

D.I. YOGYAKARTA

Nomor : 500.10.2.3/414
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat A Dinas PUPESDM DIY
Acara : Focus Group Discussion Pekerjaan Penyusunan
Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Tambang di DIY

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA,



ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Nomor : 500.10.2.3/414
Tanggal : 04 Juli 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
5. Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman
6. Lurah Trimurti, Kapanewon Srandakan, Bantul
7. Lurah Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul
8. Lurah Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul
9. Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Bantul
10. Lurah Argodadi, Kapanewon Sedayu, Bantul
11. Lurah Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo
12. Lurah Gulturejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo
13. Lurah Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo
14. Lurah Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo
15. Lurah Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo
16. Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo
17. Lurah Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo
18. Lurah Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo
19. Lurah Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul
20. Lurah Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul
21. Lurah Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul
22. Lurah Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul
23. Lurah Karangasem, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul
24. Kepala Bidang ESDM
25. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM
26. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
27. Staf Pertambangan Mineral Bidang ESDM
28. Pimpinan CV. Cita Prima Konsultan
29. Tenaga Ahli Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Resume Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Tambang, Perangkat Desa, dan Masyarakat Sekitar

Kabupaten	Perusahaan/Narasumber	Infrastruktur	Pengembangan Manusia	Catatan Khusus
Kulon Progo	CV Handika Karya (Asdie Fitri Nugroho, KTT) Kalurahan Hargorejo (Carik Siti Nura'eni)	- Pembangunan jalan desa - Kompensasi rumah warga - Dana rutin ke kalurahan - Balai makam dan acara sosial - Penyerahan bibit tanaman, kolam ikan	- Beasiswa SD-SMA - Pelatihan UKM (kolam ikan, alpukat, ternak ulat pakan) - Magang mahasiswa	Kegiatan cukup rutin dan melibatkan desa; potensi UKM lokal didukung
Sleman	PT Barokah Sumber Rezeqi (KTT Asto) Kalurahan Kepuharjo (Hari Suprpto) Tokoh Masyarakat (Mas Iwan)	- Jalan desa, mushola - Gedung pelayanan desa - Listrik masuk desa - Lapangan basket SMPN - Dana kegiatan sosial dan budaya	- Belum ada program khusus - Harapan sinergi dengan pariwisata & industri susu	Infrastruktur lengkap, namun perlu pengembangan SDM; sinyal kuat untuk kolaborasi multisektor
Bantul	Penambang rakyat Sambeng (Nurmanto)	- Dana untuk kalurahan dan padukuhan - Bantuan ke janda dan anak yatim	- Belum ada program	Dominasi bentuk bantuan sosial, belum ada pelatihan atau pemberdayaan komunitas
Gunungkidul	PT Sugih Alamnugroho (Siswoyo) Kalurahan Bedoyo (Sulardi) Warga Pasar Bedoyo (Angkringan & Toko Surodadi)	- Jalan desa, perkerasan jalan - Rumah warga - Mushola/masjid - Dana sosial desa - Bantuan program stunting & lansia - Kolam resapan, reklamasi tanaman	- Beasiswa sekolah - Mayoritas pekerja lokal (90%) - Pelatihan & magang SMK - Kerja praktik mahasiswa	Sudah berjalan baik, potensi diperkuat untuk pengentasan stunting dan pelatihan usaha mandiri

Kabupaten	Perusahaan/Narasumber	Infrastruktur	Pengembangan Manusia	Catatan Khusus
Umum (Forum FGD)	FGD Masyarakat & Pemerintah Kalurahan (Gedang Sari, Serut, Kepuharjo), Bappeda Sleman	- Usulan infrastruktur jalan desa - Isu ketersediaan air bersih - Dukungan pengembangan pariwisata & pertanian pascatambang	- Usulan pelatihan bengkel & keterampilan - Dukungan peternakan susu - Kritik PPM masih dominan charity	Sorotan bahwa banyak PPM hanya bersifat amal; saran untuk keberlanjutan ekonomi dan keterlibatan masyarakat lebih luas

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

